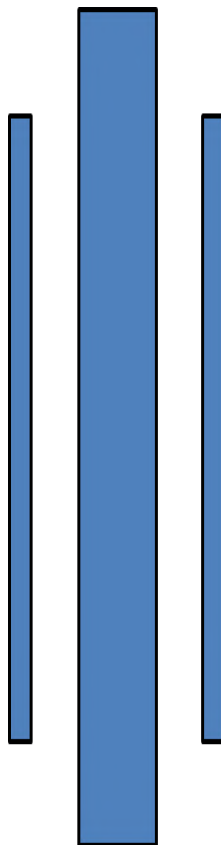




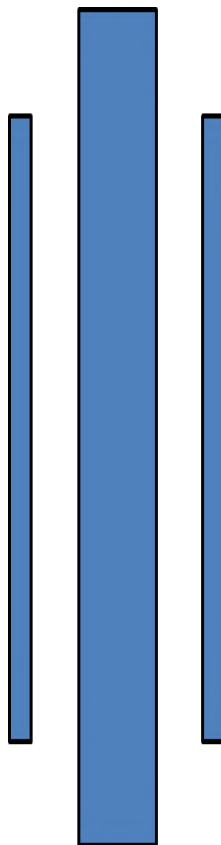
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025 - 2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025 - 2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

- 1) Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 2) Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanganyar Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Renstra ini merupakan pedoman bagi Kecamatan Karanganyar dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama lima tahun ke depan. Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga diharapkan mampu mencerminkan aspirasi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan dapat terwujudnya keselarasan arah pembangunan, peningkatan kinerja perangkat daerah, serta optimalisasi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan. Semoga dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar pada Tahun 2025–2029 dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Karanganyar.

Kebumen, 19 September 2025
Camat Karanganyar
Kabupaten Kebumen



RUJI LESTARI, S.Sos., M.PA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197412261999032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum.....	3
1.3.Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4.Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK, PERMASALAHAN DAN ISU STARTEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1.Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	11
2.1.2.Sumber Daya perangkat Daerah	21
2.1.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.1.4.Kinerja Keuangan Perangkat Daerah.....	41
2.1.5.Kelompok Sasaran Layanan.....	44
2.2.Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Karanganyar	46
2.2.1.Permasalahan Pelayanan Kecamatan Karanganyar	46
2.2.2.Isu Strategis Perangkat Daerah.....	55
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	57
3.1.Tujuan Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029.....	58
3.2.Strategi Perangkat Daerah.....	61
3.3.Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	61
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	63
4.1.Uraian Program dan Kegiatan	63
4.2.Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator,Target, Dan Pagu Indikatif	80
4.3.Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	91
4.4.Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	96
4.5.Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	97
BAB V PENUTUP	99
5.1.Pedoman Transisi.....	99
5.2.Kaidah Pelaksanaan	100
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Karanganyar Tahun 2024	9
Tabel 2.2	Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Karanganyar	10
Tabel 2.3	Kondisi Pegawai Kecamatan Karanganyar	21
Tabel 2.4	Kondisi Pegawai Kelurahan di Kecamatan Karanganyar	22
Tabel 2.5	Pegawai Kecamatan Karanganyar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	23
Tabel 2.6	Komposisi SDM Kecamatan Karanganyar 2025 Menurut Jabatan	24
Tabel 2. 7	Pegawai Kecamatan Karanganyar Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025	25
Tabel 2.8	Pegawai Kecamatan Karanganyar Berdasar Golongan Tahun 2025	26
Tabel 2.9	Aset Tanah Kecamatan Karanganyar	29
Tabel 2.10	Gedung dan Bangunan Kecamatan Karanganyar	30
Tabel 2.11	Sarana dan Prasarana Kecamatan Karanganyar	32
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanganyar Tahun 2021-2026	38
Tabel 2.13	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanganyar Tahun 2020-2025	40
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Karanganyar Tahun 2021-2025	42
Tabel 2.15	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	56
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	60
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	61
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	62
Tabel 4.1	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Karanganyar	64
Tabel 4.2	Program Perangkat Daerah Kecamatan Karanganyar	66
Tabel 4.3	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	69
Tabel 4.4	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Karanganyar	81

Tabel 4.5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah 91

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 96

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah..... 97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Karanganyar	2
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kecamatan Karanganyar	8
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kecamatan.....	13
Gambar 3.1	Konsep Rentsra Kecamatan Karanganyar	58
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Proses ini dilaksanakan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, berjenjang, dan berkelanjutan, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Perencanaan menjadi landasan awal yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, sekaligus sebagai instrumen untuk menilai kinerja pembangunan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan dan langkah antisipatif terhadap dinamika pembangunan di masa mendatang.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perencanaan strategis Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang berfungsi sebagai pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan ini dilakukan melalui pengintegrasian kapasitas sumber daya manusia dengan sumber daya lain

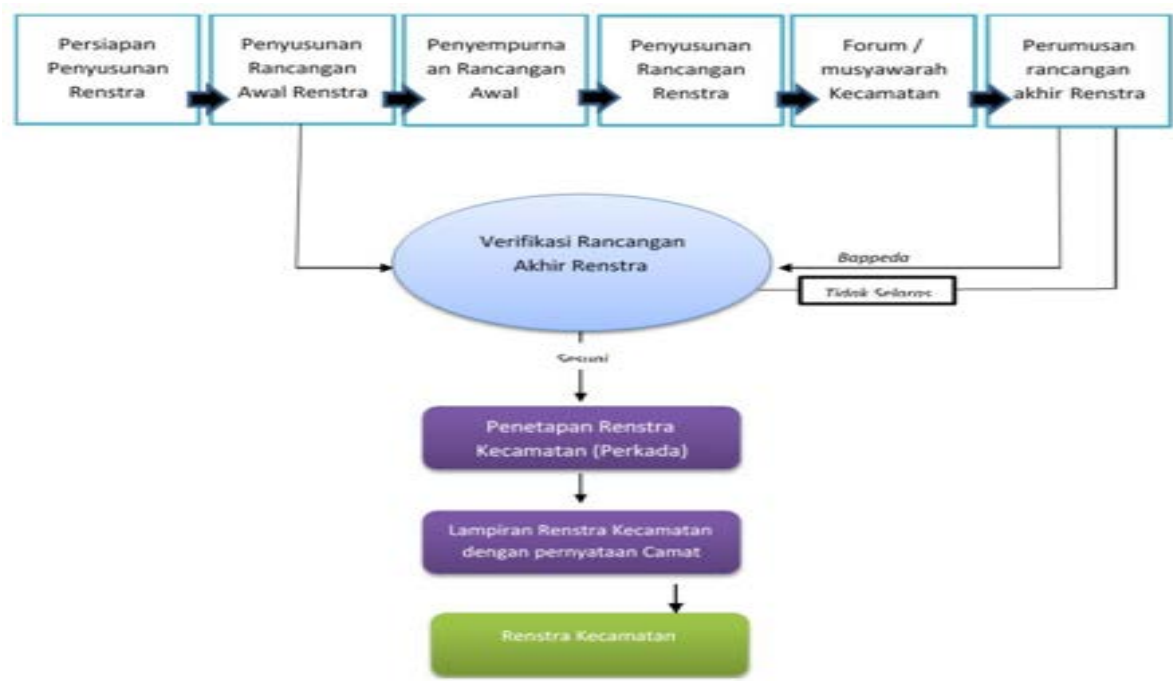
yang dimiliki, guna menjawab tantangan dan perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat daerah, nasional, maupun global, dengan tetap berlandaskan pada sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sejalan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Kebumen, maka Kecamatan Karanganyar sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanganyar yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen. Renstra Kecamatan Karanganyar disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Renstra Kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tergambar pada ilustrasi berikut:

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Karanganyar



Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan akuntabel, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen melaksanakan upaya perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan melalui penyusunan perencanaan yang terarah, konsisten, dan berkesinambungan, dengan orientasi pada pencapaian hasil dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Startegis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada

Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86); dan
26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

Renstra ini juga berfungsi sebagai acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan (Renja) setiap tahunnya, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Karanganyar adalah untuk :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun mendatang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di wilayah Kecamatan Karanganyar; dan
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Karanganyar, sumber daya, kinerja pelayanan serta kelompok sasaran layanan pelayanan Kecamatan Karanganyar. Berisi permasalahan pelayanan dan isu strategis perangkat daerah Kecamatan Karanganyar

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Kecamatan Karanganyar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.

Berisi subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah.

Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kecamatan Karanganyar.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK, PERMASALAHAN DAN ISU STARTEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kebumen dan bagian dari 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen. Secara geografis, Kecamatan Karanganyar terletak pada koordinat antara 7°27'–7°50" Lintang Selatan dan 109°35'–109°03" Bujur Timur. Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kebumen yang berbatasan dengan beberapa Kecamatan, antara lain:

- Sebelah Utara : Kecamatan Karanggayam
- Sebelah Timur : Kecamatan Sruweng
- Sebelah Selatan : Kecamatan Adimulyo
- Sebelah Barat : Kecamatan Gombong

Berdasarkan data Kecamatan Karanganyar dalam Angka Volume 32 Tahun 2025, luas wilayah Kecamatan Karanganyar tercatat sebesar 31,23 km² yang terbagi menjadi 4 (empat) kelurahan dan 7 (tujuh) desa. Desa terluas di Kecamatan Karanganyar adalah Desa Pohkumbang dengan luas wilayah 6,30 km2 yang mencapai 20,17% dari seluruh wilayah Kecamatan Karanganyar. Luas lahan Kecamatan Karanganyar terbagi menjadi lahan pertanian sawah seluas 813 ha dan lahan pertanian bukan sawah mencapai 1.081 ha.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kecamatan Karanganyar



Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, wilayah administrasi Kecamatan Karanganyar terdiri atas 4 (empat) kelurahan dan 7 (tujuh) desa, yang meliputi:

Kelurahan:

- 1. Kelurahan Karanganyar
- 2. Kelurahan Jatiluhur
- 3. Kelurahan Plarangan
- 4. Kelurahan Panjatan

Desa:

- 1. Desa Sidomulyo
- 2. Desa Grenggeng
- 3. Desa Wonoreja
- 4. Desa Pohkumbang
- 5. Desa Karangkemiri
- 6. Desa Candi
- 7. Desa Giripurno

Gambaran Penduduk di Kecamatan Karanganyar sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Karanganyar Tahun 2024

NO	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Desa Sidomulyo	851	828	1.679
2	Kelurahan Panjatan	827	805	1.632
3	Kelurahan Karanganyar	2.004	1.978	3.982
4	Kelurahan Jatiluhur	1.385	1.324	2.709
5	Desa Candi	1.748	1.747	3.495
6	Desa Giripurno	1.681	1.606	3.287
7	Kelurahan Plarangan	2.561	2.636	5.197
8	Desa Karangkemiri	1.023	999	2.022
9	Desa Wonorejo	1.937	1.816	3.753
10	Desa Grenggeng	3.063	3.096	6.159
11	Desa Pohkumbang	2.457	2.318	4.775
Kecamatan Karanganyar		19.537	19.153	38.690

Sumber: Kecamatan Karanganyar dalam Angka, 2025.

Berdasarkan data tabel 2.1 Kecamatan Karanganyar memiliki penduduk sebanyak 38.690 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 19.537 jiwa dan perempuan sebanyak 19.153 jiwa kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat, ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Karanganyar.

Berdasarkan data Kecamatan Karanganyar dalam Angka, Volume 32 Tahun 2025, ketersediaan sarana pendidikan di Kecamatan Karanganyar pada periode 2024/2025 mencakup 21 Taman Kanak-Kanak, 25 Sekolah Dasar, 5 Sekolah Menengah Pertama, 1 Sekolah Menengah Atas, dan 7 Sekolah Menengah Kejuruan. Keberadaan sarana pendidikan tersebut menjadi pendukung utama dalam penyelenggaraan layanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Karanganyar. Sementara itu, sarana kesehatan yang tersedia di Kecamatan Karanganyar pada tahun 2024 meliputi 1 Puskesmas, 2 Puskesmas Pembantu, 3 apotek, dan 59 Posyandu yang tersebar di desa dan kelurahan. Ketersediaan sarana kesehatan tersebut berperan penting dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan derajat kesehatan Masyarakat.

Tingkat perkembangan desa-desa di Kecamatan Karanganyar maupun di kecamatan lain di Indonesia ditinjau melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks tersebut merupakan data yang dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Indeks tersebut menunjukkan status desa, dari desa dasar hingga menjadi desa mandiri. IDM desa-desa di Kecamatan Karanganyar ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Karanganyar

No	Desa	Skor IDM	Status IDM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sidomulyo	85,67	Mandiri
2	Candi	80,94	Mandiri
3	Giripurno	80,47	Mandiri
4	Karangkemiri	78,27	Maju
5	Wonorejo	72,28	Maju
6	Grenggeng	87,24	Mandiri
7	Pohkumbang	79,69	Mandiri

Sumber: Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 343, Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 2.2, Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 menunjukkan kondisi desa yang relatif baik, di mana dari 7 (tujuh) desa yang ada, sebanyak 5 (lima) desa telah berstatus Mandiri, sedangkan 2 (dua) desa lainnya berstatus Maju.

Kecamatan Karanganyar memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, yang bersumber dari aktivitas pasar lokal serta hasil pertanian masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Potensi tersebut menjadi salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat, khususnya pada sektor pertanian dan peternakan.

Berdasarkan data Kecamatan Karanganyar dalam Angka, Volume 32 Tahun 2025, pada tahun 2024 Kecamatan Karanganyar menghasilkan berbagai komoditas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, dengan komoditas utama berupa cabai rawit. Sementara itu, untuk komoditas buah-buahan dan sayuran tahunan, tiga komoditas dengan tingkat produksi tertinggi adalah pisang, melinjo, dan nangka.

Selain sektor pertanian, Kecamatan Karanganyar juga memiliki potensi di sektor peternakan. Pada tahun 2024, populasi ternak di Kecamatan Karanganyar meliputi kambing sebanyak 2.389 ekor, sapi potong sebanyak 819 ekor, ayam buras sebanyak 14.875 ekor, serta itik sebanyak 1.053 ekor. Potensi tersebut berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

2.1.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

A. Tugas Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen tugas pokok dari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen adalah yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Kecamatan Karanganyar dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

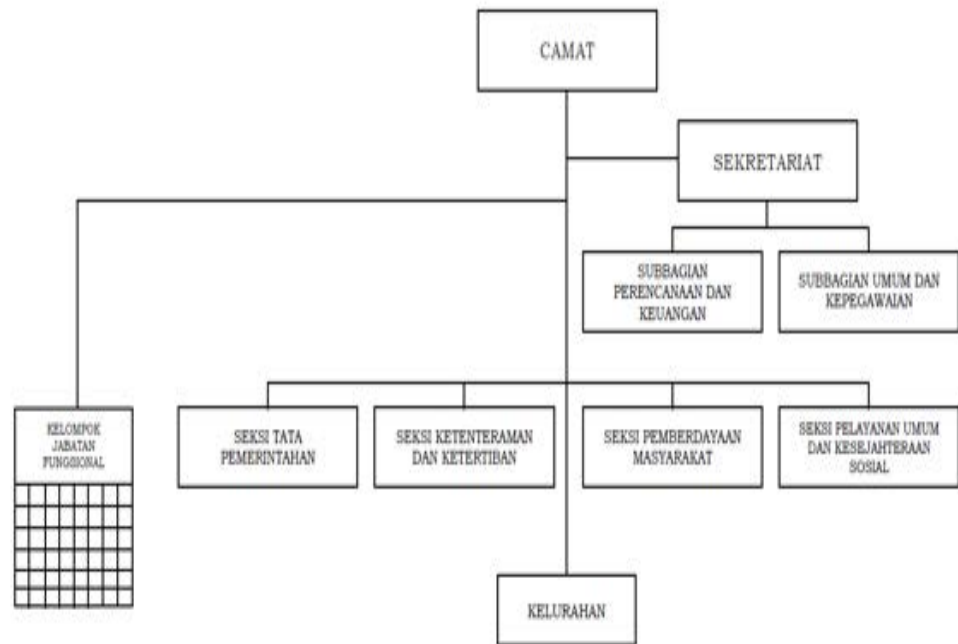
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
10. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
11. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan badan usaha milik desa; dan;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, disajikan sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber: Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016.

Berdasarkan Gambar 2.2 diatas, berikut uraian dari masing masing jabatan:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
 - d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
 - h. Pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - i. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - j. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - k. Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - l. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan

rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;

- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desadan/atau kelurahan;
 - d. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - e. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - i. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - j. Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
 - k. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - l. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - m. Penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - n. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengantugas dan fungsinya.
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. Penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dengan kepolisian negara

- republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
 - k. Penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
 - l. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan

kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan badan usaha milik desa;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan

Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan teknis pelayanan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- c. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- h. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa;
- k. Penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.Sumber Daya perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

A. Sumber Daya Aparatur

Sumberdaya manusia pada Kecamatan Karanganyar di klasifikasikan ke dalam sumber daya aparatur. Kondisi pegawai Kecamatan Karanganyar dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Kondisi Pegawai Kecamatan Karanganyar

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	10	11	11	11	9
Perempuan	4	5	5	5	7
Jumlah ASN	14	16	16	16	16

Sumber: Sekretariat Kecamatan Karanganyar, 2025.

Berdasarkan tabel 2.3, diatas kondisi pegawai Kecamatan Karanganyar selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel data terbaru dimana tahun 2025 Kecamatan Karanganyar memiliki jumlah ASN sebanyak 16 (enam belas) orang terdiri dari

PNS 12 (tiga belas) orang, CPNS 1 (satu) orang, dan PPPK 3 (tiga) orang.

Kondisi pegawai ASN di Kelurahan yang ada di Kecamatan Karanganyar selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah, data diambil dari data tiap kelurahan yaitu Kelurahan Jatiluhur, Kelurahan Plarangan, Kelurahan Panjatan, dan Kelurahan Karanganyar.

Tabel 2.4 Kondisi Pegawai Kelurahan di Kecamatan Karanganyar

Kelurahan	Jenis Kelamin	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jatiluhur	Laki-laki	3	2	2	2	3
	Perempuan	2	2	2	3	2
	Jumlah ASN	5	4	4	5	5
Plarangan	Laki-laki	3	3	5	5	4
	Perempuan	3	3	2	2	2
	Jumlah ASN	6	6	7	7	6
Panjatan	Laki-laki	7	6	5	6	6
	Perempuan	3	3	2	2	2
	Jumlah ASN	10	9	7	7	7
Karanganyar	Laki-laki	8	8	5	4	4
	Perempuan	1	1	1	1	1
	Jumlah ASN	9	9	6	5	5

Sumber: Sekretariat Kelurahan di wilayah Kecamatan Karanganyar, 2025.

Berdasarkan tabel 2.4 diatas, tahun 2025, Kelurahan Jatiluhur memiliki jumlah ASN sebanyak 5 (lima) orang, Kelurahan Plarangan memiliki jumlah ASN sebanyak 6 (enam) orang, Kelurahan Panjatan memiliki jumlah ASN sebanyak 7 (tujuh) orang, dan Kelurahan Karanganyar memiliki jumlah ASN sebanyak 5 (lima) orang.

Tabel 2.5 Pegawai Kecamatan Karanganyar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	0	1	1
2	Sekretaris Kecamatan	0	0	0
3	KaSubbag Perencanaan dan Keuangan	1	0	1
4	KaSubbag Umum dan Kepegawaian	0	1	1
5	Seksi Tata Pemerintahan	1	0	1
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	1	0	1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	0	1
9	Staf Perencanaan dan Keuangan	0	3	3
10	Staf Umum dan Kepegawaian	2	1	3
11	Staf Tata Pemerintahan	1	0	1
12	Staf Ketenteraman dan Ketertiban	0	0	0
13	Staf Pemberdayaan Masyarakat	1	1	2
14	Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	0	1
Jumlah		9	7	16
Persentase		56,25%	43,75%	100%

Sumber: Sekretariat Kecamatan Karanganyar, 2025.

Dari tabel 2.5 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan pegawai perempuan dengan perbandingan persentase laki-laki 56,25% dengan jumlah 9 (sembilan) orang dan perempuan 43,75% dengan jumlah 7 (tujuh) orang, sedangkan pengisi jabatan struktural lebih banyak diisi oleh pegawai laki-laki. Terdapat beberapa jabatan struktural yang belum terisi, yaitu Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, yang berpotensi memengaruhi

optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.6 Komposisi SDM Kecamatan Karanganyar 2025 Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	3A	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	0
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	4B	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	4B	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	4A	1
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	4A	1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	0
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	4A	1
9	Pengadministrasi Umum	-	2
10	Pengadministrasi Keuangan	-	1
11	Pengadministrasi Kependudukan	-	1
12	Pengadministrasi Perkantoran	-	1
13	Perencana Ahli Pertama	-	1
14	Verifikator Keuangan	-	1
15	Petugas Keamanan	-	1
16	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahi Pertama	-	1
17	Arsiparis Terampil	-	1
Jumlah			16

Sumber: Sekretariat Kecamatan Karanganyar, 2025.

Berdasarkan tabel 2.6 diatas, Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 terdiri dari 16 orang pegawai, yang tersebar pada berbagai jabatan struktural maupun fungsional. Berdasarkan data, terdapat 9 pegawai laki-laki dan 7 pegawai perempuan. Secara umum, komposisi tersebut menunjukkan keseimbangan yang cukup baik antara laki-laki dan perempuan di lingkungan kerja Kecamatan Karanganyar.

Jabatan struktural terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan, Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian, serta empat seksi yaitu: Seksi Tata Pemerintahan; Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; Seksi Pemberdayaan Masyarakat; serta Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial. Selain itu terdapat staf pelaksana yang mendukung kegiatan administrasi dan pelayanan.

Dari komposisi tersebut, jabatan Camat diisi oleh pegawai perempuan, Sekretaris Kecamatan kosong, Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan diisi oleh pegawai laki-laki , Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian diisi oleh pegawai perempuan, serta empat seksi yaitu: Seksi Tata Pemerintahan; Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; serta Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial semuanya diisi oleh pegawai laki-laki, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat masih kosong.

Gambaran Pegawai Kecamatan Karanganyar dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Pegawai Kecamatan Karanganyar Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	√						1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-	-	0
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		√					1
4	Subbag Umum dan Kepegawaian		√					1
5	Seksi Tata Pemerintahan		√					1
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban		√					1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	0
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		√					1
9	Pengadministrasi Umum		√		√			2
10	Pengadministrasi Keuangan				√			1
11	Pengadministrasi Kependudukan				√			1
12	Pengadministrasi Perkantoran				√			1
13	Perencana Ahli Pertama		√					1
14	Verifikator Keuangan			√				1

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
15	Petugas Keamanan				√			1
16	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahi Pertama		√					1
17	Arsiparis Terampil			√				1
Jumlah		1	8	2	5	-	-	16
Persentase		6,25 %	50 %	12,5 %	31,25 %	-	-	100 %

Sumber: Sekretariat Kecamatan Karanganyar, 2025.

Berdasarkan tabel 2.7 diatas tingkat pendidikan menunjukkan bahwa dari total 16 orang pegawai, sebagian besar telah memiliki pendidikan tinggi (S1), yaitu sebanyak 8 orang atau 50%. Selanjutnya terdapat 1 orang atau 6,25% berpendidikan S2, 2 orang atau 12,5% berpendidikan D3, dan 5 orang atau 31,25% berpendidikan SLTA. Tidak terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP maupun SD.

Komposisi ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan aparatur Kecamatan Karanganyar relatif baik, dengan mayoritas pegawai telah menyelesaikan pendidikan sarjana. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Gambaran pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8 Pegawai Kecamatan Karanganyar Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan							Jumlah
		PPPK			PNS				
		V	VII	IX	I	II	III	IV	
1	Camat							√	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan						√		1
4	Subbag Umum dan Kepegawaian						√		1
5	Seksi Tata Pemerintahan						√		1

No	Uraian	Golongan							Jumlah
		PPPK			PNS				
		V	VII	IX	I	II	III	IV	
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban						√		1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial						√		1
9	Pengadministrasi Umum						√		1
10	Pengadministrasi Keuangan						√		1
11	Pengadministrasi Kependudukan						√		1
12	Pengadministrasi Perkantoran	√					√		2
13	Perencana Ahli Pertama						√		1
14	Verifikator Keuangan					√			1
15	Petugas Keamanan						√		1
16	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahi Pertama			√					1
17	Arsiparis Terampil		√						1
Jumlah		1	1	1		1	11		16
Persentase		6,25 %	6,25 %	6,25 %		6,25 %	68,75 %		100 %

Sumber: Sekretariat Kecamatan Karanganyar, 2025.

Berdasarkan tabel 2.8 diatas, mayoritas pegawai berada pada Golongan III atau 68,75 %,yang menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur Kecamatan Karanganyar sudah memiliki masa kerja dan pengalaman yang cukup, atau kualifikasi pendidikan yang memadai (S1 atau sederajat).

Terdapat pegawai Golongan PPPK yaitu V/VII/IX yang memperkuat kapasitas kepemimpinan dan kompetensi teknis di tingkat kecamatan. Komposisi golongan cukup beragam, sehingga memungkinkan terjadinya proses pembinaan karier dan regenerasi ASN yang berkesinambungan.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Karanganyar didukung oleh aset daerah berupa sarana dan prasarana yang digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional. Adapun gambaran sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Aset Tanah

Aset Tanah Kecamatan Karanganyar merupakan aset daerah yang berfungsi sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, yang pengelolaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tabel di bawah ini menggambarkan kondisi kepemilikan tanah di Kecamatan Karanganyar:

Tabel 2. 9 Aset Tanah Kecamatan Karanganyar

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Lapangan Lainnya	30.230 m2	2016	Kecamatan Karanganyar	Pakai	27/01/2016	121	Alun-alun/ Lapangan, Kecamatan Karanganyar	Hibah	7.345.890.000,00	
2	Tanah Bangunan Gudang	4.817 m2	1986	Kecamatan Karanganyar	Pakai	18/09/1986	29	Kantor Kecamatan	Pengadaan APBD	496.151.000,00	

Sumber: Laporan BMD Kecamatan Karanganyar, 2024.

Berdasarkan data pada tabel 2.9 diatas, aset tanah Kecamatan Karanganyar dimiliki merupakan bagian dari barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Aset tanah tersebut tersebar di beberapa lokasi dan dimanfaatkan sebagai lahan perkantoran serta fasilitas penunjang pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, aset tanah yang tercatat dalam tabel telah didukung dengan status penguasaan dan pemanfaatan yang jelas, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Karanganyar.

2. Aset Bangunan/Gedung

Aset bangunan/gedung memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, tempat pelayanan administrasi, serta sarana pendukung kegiatan pertemuan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan aset bangunan/gedung dilaksanakan secara tertib, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan mengenai kondisi fisik, status kepemilikan, fungsi, serta tingkat pemanfaatan aset bangunan/gedung di lingkungan Kecamatan Karanganyar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 10 Gedung dan Bangunan Kecamatan Karanganyar

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (Rp)	Keterangan
BANGUNAN GEDUNG KANTOR									
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	261	Komplek Kantor Kecamatan Karanganyar	261	Kecamatan Karanganyar	Pengadaan APBD	680.673.123,00	
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	B	77	Jalan Kartini No.37 Karanganyar	77	Kecamatan Karanganyar	Pengadaan APBD	60.995.036,00	
BANGUNAN GUDANG									
3	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	B	120	Jalan Kartini No.37 Karanganyar	120	Kecamatan Karanganyar	Pengadaan APBD	82.830.233,00	
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH									
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	B	110	Jalan Kartini No.37 Karanganyar	110	Kecamatan Karanganyar	Pengadaan APBD	386.349.732,00	

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m ²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga (Rp)	Keterangan
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN									
5	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	B	420	Jl.Kartini No.37 Karanganyar	420	Kecamatan Karanganyar	Pengadaan APBD	601.309.969,00	
6	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	B	180	Komplek Kantor Kecamatan Karanganyar	180	Kecamatan Karanganyar	Pengadaan APBD	178.833.344,00	
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA									
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain - Lain	B	2.635,17	Jalan Kartini No.37 Karanganyar	2.635,17	Kecamatan Karanganyar	Pengadaan APBD	601.282.911,00	
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain - Lain	B	4.200	Jalan Kartini No.37 Karanganyar	4.200	Kecamatan Karanganyar	Pengadaan APBD	96.361.900,00	
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL									
9	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	B	135	Komplek Kantor Kecamatan Karanganyar	135	Kecamatan Karanganyar	Pengadaan APBD	352.072.502,00	
MONUMEN									
10	Monomen/Bangunan Bersejarah Lain-lain	B	30.894	karanganyar	30.894	Kecamatan Karanganyar	Pengadaan APBD	3.739.044.082,00	

Sumber: Laporan BMD Kecamatan Karanganyar, 2024.

3. Sarana dan Prasarana Kecamatan

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar. Adapun sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11 Sarana dan Prasarana Kecamatan Karanganyar

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
ELECTRIC GENERATING SET								
1	Portable Generating Set	1	1	0	0	0	1	1
KENDARAAN DINAS								
2	Station Wagon (Mobil)	1	1	0	0	0	1	1
KENDARAAN DINAS								
3	Sepeda Motor	16	16	0	0	0	16	16
ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR								
4	Lemari Besi/Metal	4	4	0	0	0	4	4
5	Rak Kayu	1	1	0	0	0	1	1
6	Filing Cabinet Besi	4	4	0	0	0	4	4
7	Lemari Kaca	1	1	0	0	0	1	1
ALAT KANTOR LAINNYA								
8	LCD Projector/Infocus	3	2	1	0	0	3	3
9	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	1	1	0	0	0	1	1
MEUBELAIR								
10	Meja Rapat	3	3	0	0	0	3	3
11	Tempat Tidur Kayu	1	1	0	0	0	1	1
12	Meja Podium	1	1	0	0	0	1	1
13	Meja Resepsionis	2	2	0	0	0	2	2
14	Kursi Rapat	88	88	0	0	0	88	88
15	Kursi Tamu	1	1	0	0	0	1	1

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
16	Bangku Tunggu	3	3	0	0	0	3	3
17	Kursi Lipat	17	17	0	0	0	17	17
18	Sofa	3	3	0	0	0	3	3
19	Meubelair Lain-Lain	2	2	0	0	0	2	2
ALAT PEMBERSIH								
20	Mesin Pemotong Rumput	1	0	1	0	0	1	1
ALAT PENDINGIN								
21	A.C. Window	6	6	0	0	0	6	6
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)								
22	Televisi	1	0	1	0	0	1	1
23	Microphone	2	2	0	0	0	2	2
24	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain	2	2	0	0	0	2	2
ALAT PEMADAM KEBAKARAN								
25	Alat Pembantu Kebakaran	2	0	0	2	0	2	2
MEJA KERJA PEJABAT								
26	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0	0	0	1	1
27	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	0	0	0	4	4
28	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	6	0	0	0	6	6
KURSI KERJA PEJABAT								
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2	0	0	0	2	2
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	6	0	0	0	6	6
31	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	1	0	0	0	1	1
KURSI RAPAT PEJABAT								
32	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	30	30	0	0	0	30	30
33	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	1	0	0	0	1	1
ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB								
34	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-Lain	1	1	0	0	0	1	1
ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA								
35	Digital Thermometer	1	0	1	0	0	1	1

No	Jenis Barang	Keadaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
PERSONAL KOMPUTER								
36	P.C Unit	3	3	0	0	0	3	3
37	Lap Top	8	8	0	0	0	8	8
38	Note Book	2	2	0	0	0	2	2
PERALATAN PERSONAL KOMPUTER								
39	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	8	0	0	0	8	8
40	Sound System	1	1	0	0	0	1	1

Sumber: Olahan Data BMD Kecamatan Karanganyar, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.11 tersebut di atas, pada Tahun 2025 kondisi sarana dan prasarana Kecamatan Karanganyar berdasarkan hasil laporan BMD Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 secara umum masih cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan baik dari sisi jumlah maupun kualitas sarana dan prasarana, yang antara lain disebabkan oleh usia pakai fasilitas serta belum optimalnya dukungan peralatan kerja. Kondisi tersebut berdampak pada belum terpenuhinya standar pelayanan secara optimal serta berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan, pemeliharaan, dan penambahan sarana dan prasarana secara terencana dan berkelanjutan selama periode Renstra guna mendukung peningkatan kinerja perangkat kecamatan dan kualitas pelayanan publik.

2.1.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya, dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karanganyar. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karanganyar dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Karanganyar dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Karanganyar selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya penambahan alat elektronik (AC, Dispenser) sehingga anggaran dana pada tahun 2024 yang tersedia kurang mencukupi. Namun, di tahun selanjutnya sudah menganggarkan pagu anggaran yang cukup serta dilakukan juga efisiensi penggunaan listrik.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Karanganyar setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat sudah tercukupi.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Karanganyar setiap tahun dalam menunjang kegiatan sudah mencukupi.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Karanganyar setiap tahunnya mengalami penambahan untuk menunjang kinerja.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Karanganyar setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan yang dilaksanakan.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih perlu ditambah.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Karanganyar dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Prasarana kerja seperti peralatan kantor dan mesin, kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Karanganyar di Bidang Pemerintahan tercermin dari:

a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari;

b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;

c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan, dan desa;

- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa;
 - f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.
4. Pelayanan di Bidang Pembangunan
- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
 - b. Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, dan program-program sosial lainnya;
 - c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Karanganyar;
 - d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
 - e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
 - f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Karanganyar;
 - g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN".

PATEN merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN.

Tabel 2.12 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanganyar Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	N	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																						-	
1	Indeks Reformasi Borokrasi	-	-	-	Indeks	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	59,54	62,81	70,91	85,74	85,74*	N/A	100,35%	102,41%	111,97%	131,24%	127,34%*	N/A	
	Indikator Sasaran																							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	Indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38*	N/A	101,84%	105,65%	107,33%	106,33%	105,71% *	N/A	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar	-	-	-	Indeks	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	84,86	86,66	88,79	90,90	91,83	N/A	99,84%	100,77%	102,06%	103,30%	103,18%	N/A	

. * Perkiraan realisasi

Sumber: Sekretariat Kecamatan, 2025. *Perkiraan realisasi

Berdasarkan Tabel 2.12 diatas, capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karanganyar selama periode tahun 2021–2026 menunjukkan kecenderungan yang positif dan berkelanjutan. Kinerja tersebut diukur melalui indikator tujuan dan indikator sasaran yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pada indikator tujuan, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, target Renstra Perangkat Daerah ditetapkan meningkat secara bertahap dari nilai 59,33 pada tahun 2021 menjadi 69,33 pada tahun 2026. Realisasi capaian pada tahun 2021 sampai dengan 2024 menunjukkan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian masing-masing sebesar 100,35% pada tahun 2021, 102,41% pada tahun 2022, dan 111,97% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, realisasi capaian meningkat secara signifikan hingga mencapai nilai 85,74. Sementara itu, data realisasi capaian untuk tahun 2025 perkiraan 85,74 dan 2026 belum tersedia.

Selanjutnya, pada indikator sasaran, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, target Renstra ditetapkan meningkat dari 82,50 pada tahun 2021 menjadi 86,00 pada tahun 2026. Realisasi capaian menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yaitu dari 84,02 pada tahun 2021 dan menjadi 90,38 pada tahun 2024 dan tetap pada angka 90,38* (angka perkiraan) pada tahun 2025. Persentase capaian indikator ini secara keseluruhan berada di atas 100%, yang menunjukkan bahwa kinerja pelayanan telah melampaui target yang direncanakan.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar juga menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan. Target Renstra meningkat dari 85,00 pada tahun 2021 menjadi 90,00 pada tahun 2026. Realisasi capaian meningkat dari 84,86 pada tahun 2021 menjadi 91,83 pada tahun 2025. Persentase capaian pada indikator ini sebagian besar berada di atas 100 persen, kecuali pada tahun 2021 yang masih berada sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karanganyar selama periode tahun 2021–2026 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari tercapainya, bahkan terlampauinya, sebagian besar target indikator kinerja, yang menggambarkan komitmen Kecamatan Karanganyar dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Tabel 2.13 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanganyar Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun Ke						Realisasi Kinerja Tahun Ke						Rasio Capaian Tahun Ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Karanganyar	N/A	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	N/A	84,86	86,66	88,79	90,90	91,83	N/A	99,83%	100,77%	102,06%	103,30%	103,18%
Program Pemberdayaan Mayarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	N/A	N/A	82,14	82,30	82,48	82,48	N/A	N/A	87,17	89,55	91,11	92,37	N/A	N/A	106,12%	108,81%	110,46%	111,99%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Kecamatan Karanganyar, 2025

2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Kecamatan Karanganyar mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran. Pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Kecamatan Karanganyar dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut gambaran kinerja keuangan Kecamatan Karanganyar:

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Karanganyar Tahun 2021-2025

No	Program/ Kegiatan	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-Rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capain Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capain Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capain Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capain Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capain Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	N/A	5.690.512.000	5.383.573.172	94,61	5.340.773.000	4.837.557.089	90,58	6.005.958.000	5.285.413.227	88,00	5.686.003.832	4.755.600.821	83,64	0,33	-3,64
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	29.000.000	28.712.100	99,01	23.578.000	22.806.200	96,73	33.500.000	29.528.100	88,14	25.939.900	24.547.810	94,63	0,27	-2,65
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	5.256.520.000	4.958.163.641	94,32	4.977.441.000	4.490.504.154	90,22	5.465.394.000	4.771.276.814	87,30	5.208.942.122	4.298.571.497	82,52	-0,07	-4,36
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	142.032.000	141.808.000	99,84	105.193.000	103.928.400	98,80	167.131.000	158.657.900	94,93	135.828.000	131.689.927	96,95	4,74	2,98
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	10.000.000	9.890.300	98,90	45.788.000	44.886.000	98,03	85.460.000	82.618.000	96,67	69.720.000	67.919.400	97,42	142,03	140,04
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	131.250.000	126.466.259	96,36	112.119.000	102.177.375	91,13	123.234.000	116.881.978	94,85	105.104.000	99.731.986	94,89	-6,46	-6,50
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	121.710.000	118.532.872	97,39	76.654.000	73.254.560	95,57	131.239.000	126.450.435	96,35	140.469.810	133.140.417	93,45	13,74	13,24
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	N/A	N/A	N/A	58.000.000	57.783.700	99,63	70.694.000	70.638.600	99,92	1.268.216.000	1.205.289.350	95,04	42.685.000	42.267.130	99,02	539,73	510,68
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	N/A	N/A	N/A	58.000.000	57.783.700	99,63	70.694.000	70.638.600	99,92	1.268.216.000	1.205.289.350	95,04	42.685.000	42.267.130	99,02	539,73	510,68

No	Program/ Kegiatan	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-Rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capain Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capain Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capain Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capain Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capain Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
	Dilimpahkan kepada Camat																	
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	N/A	N/A	N/A	4.819.906.000	4.467.612.475	92,69	3.820.048.000	3.748.413.429	98,12	4.556.894.000	4.393.439.135	96,41	3.044.932.769	2.928.390.876	96,17	-11,55	-10,75
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	4.819.906.000	4.467.612.475	92,69	3.820.048.000	3.748413.429	98,12	4.556.894.000	4.393.439.135	96,41	3.044.932.769	2.928.390.876	96,17	-11,55	-10,75
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	N/A	N/A	N/A	13.000.000	12.850.000	98,85	7.571.000	7.176.000	94,78	13.297.000	13.121.300	98,68	6.772.400	6.770.540	99,97	-5,07	-3,24
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	13.000.000	12.850.000	98,85	7.571.000	7.176.000	94,78	13.297.000	13.121.300	98,68	6.772.400	6.770.540	99,97	-5,07	-3,24
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	N/A	N/A	N/A	97.000.000	92.972.100	95,85	61.606.000	60.083.650	97,53	102.154.000	100.692.550	98,57	65.434.600	64.476.199	98,54	-2,21	-1,25
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	97.000.000	92.972.100	95,85	61.606.000	60.083.650	97,53	102.154.000	100.692.550	98,57	65.434.600	64.476.199	98,54	-2,21	-1,25
Total		N/A	N/A	N/A	10.678.418.000	10.014791.447	93,79	9.300.692.000	8.723.868.765	93,80	11.946.519.000	10.997.955.562	92,06	8.845.828.610	7.797.505.566	88,15	-12,90	28,45

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kecamatan Karanganyar sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan administratif, koordinatif, dan fasilitatif memiliki beragam kelompok sasaran layanan. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok sasaran agar perumusan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

1. Masyarakat Umum

Kelompok sasaran terbesar adalah masyarakat umum yang membutuhkan layanan dasar berupa administrasi kependudukan, pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta layanan informasi publik. Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Karanganyar Tahun 2024, jumlah penduduk tercatat sebanyak 38.690 jiwa dengan struktur penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sebaran penduduk yang cukup besar, khususnya di Desa Grenggeng, Kelurahan Plarangan, dan Desa Pohkumbang, menunjukkan tingginya potensi penduduk usia produktif. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan, kepastian dokumen hukum, pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta akses informasi publik yang cepat, mudah, dan berkualitas.

2. Pemerintah Desa dan Kelurahan

Kecamatan Karanganyar membawahi 4 (empat) Kelurahan dan 7 (tujuh) Desa yang berperan sebagai mitra kerja utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, Kecamatan Karanganyar melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, serta pendampingan, khususnya pada aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan.

3. Kelompok Perempuan dan Anak

Layanan bagi kelompok perempuan dan anak semakin relevan seiring program pemberdayaan masyarakat, PKK, serta upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga. Data terpilah menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan

berperan aktif dalam sektor ekonomi kreatif, kesehatan, serta pendidikan keluarga sehingga kecamatan perlu memastikan adanya fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta layanan ramah anak.

4. Kelompok Pemuda

Pemuda memiliki potensi strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal, pemanfaatan teknologi informasi, serta pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, Kecamatan Karanganyar perlu mendorong penguatan peran dan kapasitas organisasi kepemudaan, fasilitasi pelatihan kewirausahaan, serta peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam proses pembangunan di tingkat desa dan kecamatan.

5. Kelompok Rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Warga Miskin).

Hasil analisis sosial menunjukkan masih terdapat warga miskin dan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, penyelenggaraan layanan di Kecamatan Karanganyar diarahkan untuk memastikan kelompok tersebut memperoleh akses yang adil dan setara terhadap program bantuan sosial, pelayanan administrasi, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, penyediaan fasilitas pelayanan publik yang inklusif dan aksesibel menjadi salah satu prioritas strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan kelompok rentan.

6. Pelaku Ekonomi Lokal

Pelaku ekonomi lokal di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada sektor kerajinan, kuliner khas daerah, serta perdagangan. Berdasarkan data dan hasil pendataan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, UMKM tersebut tersebar di hampir seluruh wilayah dan berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat serta penyerapan tenaga kerja lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang perlu terus didukung melalui fasilitasi peningkatan kapasitas usaha, akses pemasaran, dan penguatan kelembagaan.

2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Karanganyar

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Karanganyar

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengenai kondisi atau keadaan yang belum sesuai dengan kondisi ideal sebagaimana yang diharapkan. Kecamatan Karanganyar sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur kewilayahan dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi sejumlah permasalahan strategis.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Karanganyar diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Karanganyar, telaahan tata ruang wilayah, dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Karanganyar, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Kecamatan Karanganyar.

1. Dari aspek sumber daya manusia, masih terdapat ketidakseimbangan antara jumlah pejabat struktural dan jumlah staf pelaksana yang tersedia. Kondisi tersebut diperkuat dengan masih adanya kekosongan jabatan struktural, yang berdampak pada belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Selain itu, keterbatasan jumlah staf pelaksana menyebabkan beban kerja tidak merata dan berpotensi menghambat efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Selain itu, dari sisi kualifikasi pendidikan, komposisi pegawai Kecamatan Karanganyar menunjukkan bahwa sebagian aparatur telah berpendidikan Strata Satu (S1), namun masih terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan di bawah S1. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun proporsi aparatur berpendidikan tinggi cukup signifikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap diperlukan, khususnya melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas bagi aparatur berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA),

guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Dari aspek geografis, Kecamatan Karanganyar memiliki karakteristik wilayah dengan kondisi pegunungan pada beberapa desa, yaitu Desa Pohkumbang, Desa Wonorejo, dan Desa Giripurno, yang berpotensi mempengaruhi aksesibilitas serta efektivitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
4. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung perkantoran yang belum sepenuhnya memadai dalam menunjang pelaksanaan fungsi organisasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik.

Secara umum, permasalahan Kecamatan Karanganyar mencakup keterbatasan dan ketidakseimbangan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah, struktur jabatan, maupun kualifikasi pendidikan, yang berdampak pada beban kerja dan efektivitas pelayanan. Kondisi geografis wilayah pegunungan serta keterbatasan sarana dan prasarana perkantoran turut menjadi faktor penghambat optimalisasi kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

B. Telaah

1. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

2. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2024–2044, arah kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen menekankan pada pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah, termasuk perkembangan demografi, ekspansi permukiman, serta kebutuhan pelestarian dan konservasi lingkungan hidup.

Dalam rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang didasarkan pada sistem pusat permukiman, Kecamatan Karanganyar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal dalam kategori Kawasan Perkotaan Gombong–Karanganyar, yang berfungsi sebagai simpul pelayanan pemerintahan, ekonomi, sosial, dan permukiman, serta mendukung keterpaduan pengembangan wilayah perkotaan dan sekitarnya.

Kecamatan Karanganyar merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Karanganyar-Gombong yang dilalui oleh jalur-jalur utama, yaitu:

a. Jalur Utama Jalan Nasional

Jalan Raya Karanganyar (jalur utama lintas selatan Pulau Jawa) yang menghubungkan wilayah barat (Gombong/Banyumas) dan timur (Sruweng/Kebumen kota).

b. Jalur Rel Kereta Api

Jalur ganda (double track) kereta api lintas selatan Jawa yang melintasi wilayah Kecamatan Karanganyar.

c. Kawasan Perkotaan Karanganyar-Gombong

Sesuai Perda RTRW, wilayah ini diproyeksikan sebagai pusat pelayanan agrobisnis dan pengembangan kawasan kota yang mencakup 4 kecamatan termasuk Karanganyar dan Gombong.

d. Pusat Pelayanan Kecamatan

Meliputi Desa/Kelurahan yang dilalui jalur utama seperti Kelurahan Karanganyar (terdekat dengan pusat pemerintahan kecamatan) hingga desa-desa sekitar yang terhubung dengan akses jalur penghubung antar kecamatan (seperti ke arah Karanggayam).

Kecamatan Karanganyar dalam RTRW Kabupaten Kebumen difokuskan pada pengembangan kawasan hunian, industri ringan, dan perwujudan kawasan perkotaan yang mandiri.

4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Petanahan, yaitu:

1. Ancaman bencana banjir dan kekeringan terutama terjadi di wilayah dengan terbatasnya area resapan air serta drainase yang belum memadai sehingga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat serta menurunkan kualitas lingkungan.
2. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang belum optimal di Kawasan padat penduduk dan area pasar berisiko

menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta meningkatkan potensi terjadinya banjir.

3. Banyaknya kawasan perumahan menjadi salah satu faktor yang membuka peluang ekonomi baru.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kebumen, teridentifikasi sejumlah isu strategis lingkungan hidup yang relevan dan perlu menjadi acuan dalam perumusan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Karanganyar, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Berkelanjutan
Mengingat Karanganyar adalah salah satu pusat pertumbuhan/kecamatan strategis, isu utamanya adalah pemenuhan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan kualitas jalan, sistem pengelolaan air limbah domestik, dan drainase lingkungan agar tidak mencemari lingkungan.
- b. Pengelolaan Sampah dan Limbah Cair
Peningkatan kepadatan permukiman dan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan Karanganyar menyebabkan isu timbunan sampah dan potensi pencemaran air/sungai oleh limbah cair rumah tangga, yang memerlukan sistem pengelolaan limbah yang lebih baik.
- c. Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Mitigasi Risiko Lingkungan)
Identifikasi risiko bencana (seperti banjir, tanah longsor di area perbukitan) sebagai bagian dari penataan ruang dan infrastruktur yang harus diantisipasi dalam pembangunan.
- d. Perlindungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Memastikan alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian (industri/pemukiman) tetap memperhatikan kapasitas lingkungan, untuk menjaga jasa ekosistem dan memelihara fungsi lingkungan hidup.
- e. Adaptasi Perubahan Iklim
Pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

5. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten

Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi kabupaten Kebumen periode 2025–2029 yaitu:

Kebumen Berdaya:

Kebumen Beriman–Maju–Sejahtera–Berbudaya

Kebumen Berdaya memiliki makna bahwa masyarakat Kebumen harus lebih sejahtera, ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan meninggalkan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah; penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang mengedepankan sistem merit; pembangunan daerah yang berkeadilan gender, inklusif dan berwawasan lingkungan berkelanjutan; pemerataan pembangunan infrastruktur pada wilayah pinggiran dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (desa dan kawasan perdesaan); dan memiliki kekuatan nilai-nilai keagamaan dan modal sosial sebagai jatidiri masyarakat Kebumen. Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

1. **Beriman:** Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.
2. **Maju:** Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik

(SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui teknokreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.

3. **Sejahtera:** Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
4. **Berbudaya:** Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam Upaya mewujudkan visi pembangunan

Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.
2. MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.
3. MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.
4. MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-

kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

5. MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Kebumen mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi*** melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik mencakup penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalisme dalam setiap aspek pelayanan publik. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan kejelasan prosedur dalam proses pelayanan administrasi di kecamatan. Akuntabilitas tercermin dari tanggung jawab pemerintah atas kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya publik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Partisipasi ditunjukkan dengan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Sementara itu, profesionalisme menuntut aparatur memiliki kompetensi, integritas, serta etos kerja tinggi dalam memberikan pelayanan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, dan ramah. Berikut adalah peranan Kecamatan Karanganyar yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. Ayem, Tentrem, Guyup, Rukun

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong, dan guyup rukun masyarakat diantaranya menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembangan seni dan budaya, serta mendorong kegiatan budaya desa seperti merdi deso, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian cagar budaya.

2. ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif

Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam bekerja dan berinovasi melalui *merit system* menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau *reward* ASN di wilayah pinggiran/perbatasan.

3. Desa Berdaya

Program ini diprioritas untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian. Agenda kegiatan yang akan dilakukan meliputi penguatan ekonomi Desa, penguatan tata Kelola Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di wilayah Kecamatan Kebumen, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Kebumen. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Kebumen.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di Kecamatan Karanganyar sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Ancaman bencana banjir dan kekeringan • Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang belum optimal	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025– 2029 adalah:

Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman- Maju – Sejahtera – Berbudaya

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.
2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.
3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni*, *ngayomi* dan *ngayemi*.

dengan memperhatikan NSPK dan arah kebijakan RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan secara selaras (cascading) ke dalam strategi serta program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah guna menghasilkan output dan outcome sesuai sasaran pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karanganyar tahun 2025-2029 ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan. Tujuan dan sasaran renstra telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029. Hubungan kesesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karanganyar	90,30	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Karanganyar	Indeks Tata Kelola Kecamatan Karanganyar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, menggambarkan teknik perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu pada NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan. Tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola Kecamatan Karanganyar. Pencapaian sasaran diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karanganyar serta Indeks Tata Kelola Kecamatan Karanganyar, dengan target kinerja yang ditetapkan secara bertahap untuk periode tahun 2025–2030 sebagai bentuk komitmen peningkatan kinerja pelayanan dan tata kelola pemerintahan kecamatan secara berkelanjutan.

3.2. Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Kecamatan Karanganyar tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus, dan penentuan program atau kegiatan atau sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan atau sasaran Renstra Kecamatan Karanganyar.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Petanahan. Penahapan Renstra kecamatan Petanahan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Penahapan pembangunan dimaksudkan sebagai prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Karanganyar. Penahapan dalam Renstra Kecamatan Karanganyar disusun secara bertahap dan berkesinambungan, serta dapat disajikan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan pada RPJMD menjadi dasar bagi kecamatan dalam merumuskan kebijakan operasional yang lebih spesifik sesuai dengan kewenangan dan karakteristik wilayah. Melalui kebijakan tersebut,

Kecamatan Karanganyar berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih mudah diakses, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Selain itu, penguatan koordinasi antara kecamatan dengan perangkat daerah dan para pemangku kepentingan (stakeholder) menjadi langkah penting untuk memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan. Keterkaitan arah kebijakan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, menggambarkan teknik perumusan arah kebijakan Renstra Kecamatan Karanganyar yang disusun melalui operasionalisasi NSPK dan penjabaran arah kebijakan RPJMD. Berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, arah kebijakan RPJMD berupa peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan koordinasi antar perangkat daerah diterjemahkan ke dalam arah kebijakan Renstra Kecamatan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan yang mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat, serta peningkatan koordinasi kecamatan dengan para pemangku kepentingan guna mendukung tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif dan akuntabel.

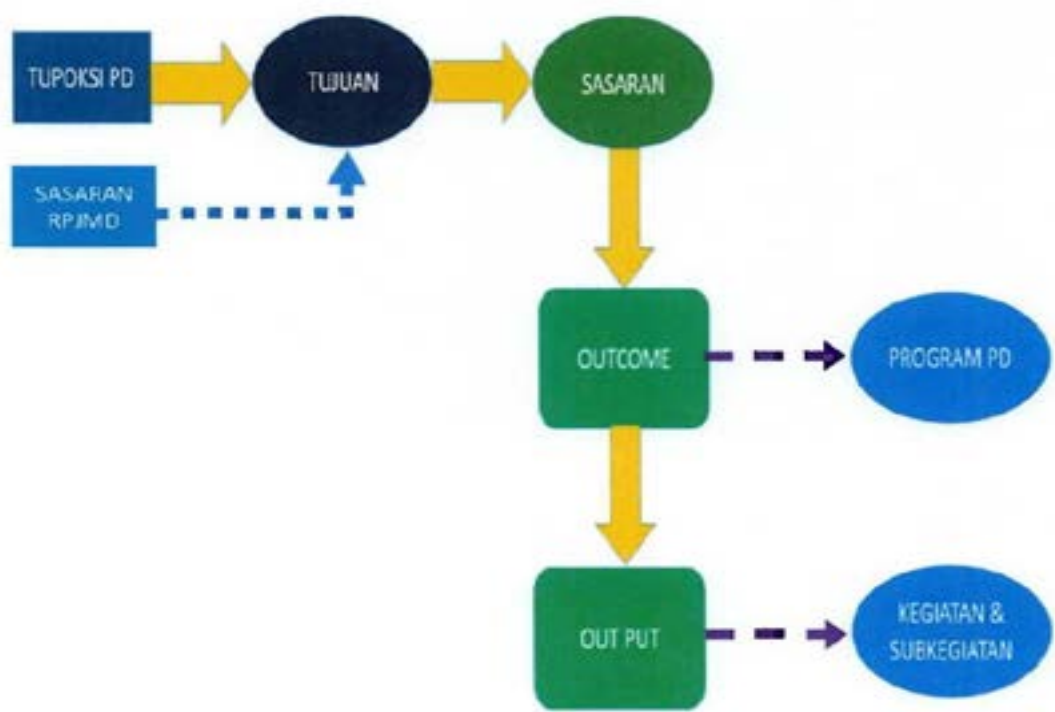
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Tigaraksa guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kecamatan Karanganyar dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 5 (Lima) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Karanganyar. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Karanganyar dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah



Berikut uraian program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Karanganyar dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2025-2029 antara lain:

Tabel 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Karanganyar

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 9. Penyediaan Bahan/Material; 10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 11. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	20. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan. 21. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan.

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
8.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
9.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; 24.Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; 25.Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa; 26.Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 27.Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif; 28.Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 29.Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.
E. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
10.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 31.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 32.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 33.Evaluasi Kelurahan.

Tabel 4. 2 Program Perangkat Daerah Kecamatan Karanganyar

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNSUR KEWILAYAHAN				9.102.450.416		9.131.070.658		9.371.979.015		9.687.170.710		9.894.866.885		
7.01 - KECAMATAN				9.102.450.416		9.131.070.658		9.371.979.015		9.687.170.710		9.894.866.885		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.687.154.536		6.731.550.680		6.978.629.780		7.246.619.455		7.457.803.077	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:Nilai)	71,20	71,23	71,25		71,27		72,51		73,76		75,00		CAMAT
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Jatiluhur (Dengan Satuan:Nilai)	89	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		LURAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Plarangan (Dengan Satuan:Nilai)	92,24	92,30	92,33		92,35		92,36		92,38		92,40		LURAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjatan (Dengan Satuan:Nilai)	89	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		LURAH
	Indeks kepuasan masyarakat kelurahan karanganyar (Dengan Satuan:Nilai)	88	90,3	90,4		90,45		90,5		90,55		90,6		LURAH
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		13.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.306.095.880		2.283.319.978		2.284.149.235		2.322.551.255		2.317.063.808	
Meningkatnya Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Jatiluhur	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Jatiluhur (Dengan Satuan:Persen)	89	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		LURAH
	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Plarangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		LURAH
	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Panjatan (Dengan Satuan:Persen)	89	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		LURAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Karanganyar (Dengan Satuan:Persen)	82	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		LURAH
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					83.200.000		90.200.000		83.200.000		92.000.000		92.000.000	
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase jumlah desa di Kecamatan Karanganyar yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
TOTAL:			9.102.450.416		9.131.070.658		9.371.979.015		9.687.170.710		9.894.866.885			

Tabel 4. 3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT							
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karanganyar						
		Meningkatnya Kualitas tata kelola Kecamatan Karanganyar					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Karanganyar) (Dengan Satuan: Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokume)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					(Dengan Satuan: Dokumen)		
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dengan satuan: Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Bulan)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	bangunan kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan (Dengan Satuan: Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					(Dengan Satuan: Dokumen)		
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik (Daerah Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan: Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan: Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (Daerah Dengan Satuan:Bulan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan: Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan: Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Karanganyar) (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (Dengan Satuan: Persen)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan (Dengan Satuan: Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan (Dengan Satuan: Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan		Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan (Kelurahan) (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan (Dengan Satuan: Kegiatan)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan: Lembaga)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan: Unit)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan: Pokmas / Ormas)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan: Laporan)	Evaluasi Kelurahan	
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Karanganyar) (Dengan Satuan: P e r s e n)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan: Kegiatan)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan satuan: Orang)	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan		Persentase Jumlah Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai Ketentuan (Kecamatan Karanganyar) (Dengan Satuan: Persen)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Dengan Satuan: Persen)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dengan satuan: Dokumen)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa (Dengan satuan: Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Dengan satuan: Dokumen)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Dengan satuan: Dokumen)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Pembangunan Partisipatif	partisipatif (Dengan satuan: Dokumen)		
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya (Dengan satuan: Laporan)	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk periode 2025-2029, sedangkan belanja daerah merupakan kebutuhan anggaran yang diperlukan guna membiayai pembangunan selama periode tersebut. Indikasi program, kegiatan dan subkegiatan merujuk pada program, kegiatan dan subkegiatan yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029. Sementara itu, pagu indikatif merupakan gambaran kebutuhan pendanaan yang tersedia dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun beserta kebutuhan pendanaannya selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034.

Rumusan target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan dalam setiap urusan pemerintahan, baik bidang wajib maupun pilihan, disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, APBD Provinsi, APBN, serta sumber pendanaan lainnya, yang termuat dalam dokumen Renstra ini. Berikut ini rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan ada dalam tabel 4.4.:

Tabel 4.4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Karanganyar

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				9.102.450.416		9.131.070.658		9.371.979.015		9.687.170.710		9.894.866.885		
7.01	KECAMATAN				9.102.450.416		9.131.070.658		9.371.979.015		9.687.170.710		9.894.866.885		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.687.154.536		6.731.550.680		6.978.629.780		7.246.619.455		7.457.803.077		
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:Nilai)	71,20	71,23	71,25		71,27		72,51		73,76		75,00		CAMAT
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Jatiluhur (Dengan Satuan:Nilai)	89	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		LURAH
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Piarangan (Dengan Satuan:Nilai)	92,24	92,30	92,33		92,35		92,36		92,38		92,40		LURAH
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjatan (Dengan Satuan:Nilai)	89	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		LURAH
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat kelurahan karanganyar (Dengan Satuan:Nilai)	88	90,3	90,4		90,45		90,5		90,55		90,6		LURAH
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27.960.000		28.600.000		28.650.000		29.350.000		29.500.000		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	14		14		14		15		14		6. KASUBAG PK
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	9	9	9		9		9		9		9		KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	9	9	9		9		9		9		9		KASI PELUM DAN KESOS
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	9	9	9		9		9		9		9		KASI PELUM DAN KESOS

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahh (Dengan Satuan:Dokumen)	9	9	9		9		9		9		9		SEKRETARIS LURAH
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					16.500.000		16.750.000		16.750.000		17.100.000		17.200.000	K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	12		6		6		6		8		6		K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	7	5	6		6		6		8		6		6. KASUBAG PK
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					11.460.000		11.850.000		11.900.000		12.250.000		12.300.000	6. KASUBAG PK
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4		8		8		8		9		8		6. KASUBAG PK
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	6	8		8		8		9		8		6. KASUBAG PK
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.944.504.274		6.124.864.291		6.355.753.917		6.600.949.969		6.776.887.401	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		6. KASUBAG PK
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		SEKRETARIS LURAH
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.894.187.694		6.073.346.179		6.302.538.012		6.547.389.356		6.722.648.637	6. KASUBAG PK
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	45	45	45		45		45		45		45		6. KASUBAG PK
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					50.316.580		51.518.112		53.215.905		53.560.613		54.238.764	6. KASUBAG PK

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	6	3		3		3		3		3		6. KASUBAG PE
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					171.434.000		174.834.000		178.834.000		181.634.000		186.350.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		5. KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Plarangan (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Panjatan (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		4		12		12		12		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Karanganyar (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		SEKRETARIS LURAH
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					17.250.000		17.450.000		17.950.000		19.550.000		20.200.000	5. KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	12	4		4		4		4		4		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					50.400.000		49.900.000		52.200.000		51.300.000		54.900.000	5. KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					25.438.000		25.650.000		25.800.000		26.400.000		26.800.000	5. KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	12	4		4		4		4		4		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					10.580.000		10.900.000		10.950.000		11.550.000		11.650.000	5. KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		5. KASUBAG UMPEG

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					58.028.000		59.934.000		60.734.000		61.034.000		60.900.000	5. KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4		4		4		4		4		4		5. KASUBAG UMPEG
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	12	4		4		4		4		4		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	5. KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	12	4		4		4		4		4		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					6.238.000		7.500.000		7.700.000		8.300.000		8.400.000	5. KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	12	1		1		1		1		1		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					164.199.052		106.400.000		108.400.000		117.000.000		143.000.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	4	3	4		4		4		4		4		1. KASI TRANTIB
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	1	1	3		2		1		2		1		KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	1	4	5		3		2		2		2		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		3		3		3		3		SEKRETARIS LURAH
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					80.407.052		41.400.000		40.400.000		42.000.000		53.000.000	KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	3		1		1		1		1		KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					83.792.000		65.000.000		68.000.000		75.000.000		90.000.000	5. KASUBAG UMPEG

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		3		3		3		3		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				185.075.000		135.450.000		136.950.000		141.850.000		145.850.000		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		5. KASUBAG UMPEG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa Penunjang pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		SEKRETARIS LURAH
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.643.000		8.450.000		8.750.000		9.350.000		9.450.000		5. KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82.200.000		82.900.000		83.600.000		84.300.000		88.000.000		5. KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				95.232.000		44.100.000		44.600.000		48.200.000		48.400.000		5. KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				193.982.210		161.402.389		170.041.863		175.835.486		176.215.676		
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	23	23	23		23		23		23		23		5. KASUBAG UMPEG

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	7	7	7		7		7		7		7		KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	17	17	17		17		17		17		17		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	13	13	13		13		13		13		13		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	6	6	6		6		6		6		6		SEKRETARIS LURAH
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				42.723.000		48.100.000		49.200.000		48.300.000		48.900.000		5. KASUBAG UMPEG
	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	10	20	10		10		10		10		10		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.600.000		33.100.000		38.200.000		39.300.000		39.400.000		5. KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	10	15	10		10		10		10		10		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				117.659.210		89.202.389		92.641.863		88.235.486		87.915.676		5. KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		3		3		3		3		5. KASUBAG UMPEG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		13.000.000		
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:Person)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		13.000.000		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat Karanganyar (Dengan Satuan:Person)	100	100	100		100		100		100		100		4. KASI PELUM KESOS
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		13.000.000		4. KASI PELUM KESOS

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tertelaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		4. KASI PELUM KESOS
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	4. KASI PELUM KESOS
	Tertelaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		0		0		0		0		4. KASI PELUM KESOS
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	0		0		0		0		0		4. KASI PELUM KESOS
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.306.095.880		2.283.319.978		2.284.149.235		2.322.551.255		2.317.063.808	
	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Jatiluhur	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Jatiluhur (Dengan Satuan:Persen)	89	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		LURAH
	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Piarangan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Piarangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		LURAH
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Panjatan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Panjatan (Dengan Satuan:Persen)	89	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		LURAH
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Karanganyar	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Karanganyar (Dengan Satuan:Persen)	82	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		LURAH
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.306.095.880		2.283.319.978		2.284.149.235		2.322.551.255		2.317.063.808	
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan. (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan piarangan (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(3)	(2)	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Karanganyar (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					38.501.000		41.000.000		41.200.000		41.400.000		41.600.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	8	8	8		8		8		8		8		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.878.924.940		1.826.417.064		1.840.949.235		1.869.985.659		1.859.711.192	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					386.669.920		407.351.944		393.800.000		402.265.596		406.752.616	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	8	8	8		8		8		8		8		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					4.000.000		8.556.979		8.200.000		8.900.000		9.000.000	SEKRETARIS LURAH
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		SEKRETARIS LURAH
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:Person)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		1. KASI TRANTIB

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(3)	(2)	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	1. KASI TRANTIB
	Tertaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	55	55	55		55		55		55		55		1. KASI TRANTIB
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					83.200.000		90.200.000		83.200.000		92.000.000		92.000.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase jumlah desa di Kecamatan Karanganyar yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					83.200.000		90.200.000		83.200.000		92.000.000		92.000.000	
	Tertaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		3. KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					13.000.000		13.000.000		13.000.000		15.000.000		15.000.000	3. KASI TAPEM
	Tertaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		3. KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		7.000.000		0		0		0	3. KASI TAPEM
	Tertaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		7		0		0		0		3. KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					2.200.000		2.200.000		2.200.000		4.000.000		4.000.000	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	1. KASI TRANTIB	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		1. KASI TRANTIB	
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					15.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	4. KASI PELUM KESOS	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		4. KASI PELUM KESOS	
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	4. KASI PELUM KESOS	
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		4. KASI PELUM KESOS	
			TOTAL:	9.102.450.416			9.131.070.658			9.371.979.015			9.687.170.710			9.894.866.885

4.3. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas disusun melalui *cascading* kinerja yang dimulai dari visi hingga *outcome*, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program, kegiatan dan subkegiatan dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Berikut daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dalam Tabel 4.5. sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/ Subkegiatan (4)	Ket (5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Program Ayam, Tentrem, Guyub, Rukun
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Program ASN Nyaman, Terampil, dan Inovatif
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Program Desa Berdaya

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kelurahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Evaluasi Kelurahan	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Program Desa Berdaya
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya jumlah desa di Kecamatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Program Desa

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	DESA	yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Pengawasan Pemerintahan Desa	Berdaya
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah.

Berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tujuan								
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar	Nilai	90,30	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
	Sasaran								
2.	Indeks Tata Kelola Kecamatan Karanganyar	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Berdasarkan Tabel 4.6, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Karanganyar difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan meningkat secara bertahap dari 90,30 pada tahun 2025 menjadi 90,60 pada tahun 2030, yang mencerminkan komitmen Kecamatan Karanganyar dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Sementara itu, Indeks Tata Kelola Kecamatan ditetapkan secara konsisten pada angka 100,00 setiap tahun selama periode perencanaan, yang menunjukkan upaya mempertahankan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Secara keseluruhan, indikator kinerja utama tersebut menggambarkan arah kebijakan strategis Kecamatan Karanganyar dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kinerja pembangunan daerah mencerminkan seberapa efektif dan efisien suatu pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat ukur yang dapat menggambarkan secara objektif dan terukur terhadap tingkat pencapaian pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, indikator kinerja menjadi komponen penting yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Agar hasil evaluasi kinerja lebih akurat dan fokus, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mampu merepresentasikan pencapaian sasaran utama pembangunan secara menyeluruh dan strategis. IKK tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan ke depan.

Adapun penetapan IKK pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat dijelaskan bahwa pada periode perencanaan Renstra Tahun 2025–2029 Kecamatan Karanganyar belum memiliki IKK yang ditetapkan secara spesifik. Kondisi ini disebabkan oleh belum tersedianya penetapan indikator kinerja utama dari Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta masih dalam proses penyesuaian dengan kebijakan dan sistem pengukuran kinerja yang baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Meskipun demikian, Kecamatan Karanganyar tetap melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pelayanan publik serta peningkatan tata kelola pemerintahan, sehingga capaian kinerja Kecamatan Karanganyar dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Karanganyar selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu **“Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman Maju Sejahtera Berbudaya”**.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Karanganyar diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Karanganyar telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Karanganyar, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Kecamatan Karanganyar. Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Karanganyar, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Karanganyar yaitu belum optimalnya kualitas layanan publik di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

5.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja tahun 2026, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2026 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2025-2029. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat

dalam Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar, RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029, dan RPJPD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2045.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Karanganyar sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaiknya;
2. Kecamatan Karanganyar berkewajiban untuk Menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Karanganyar berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025
Camat Karanganyar
Kabupaten Kebumen



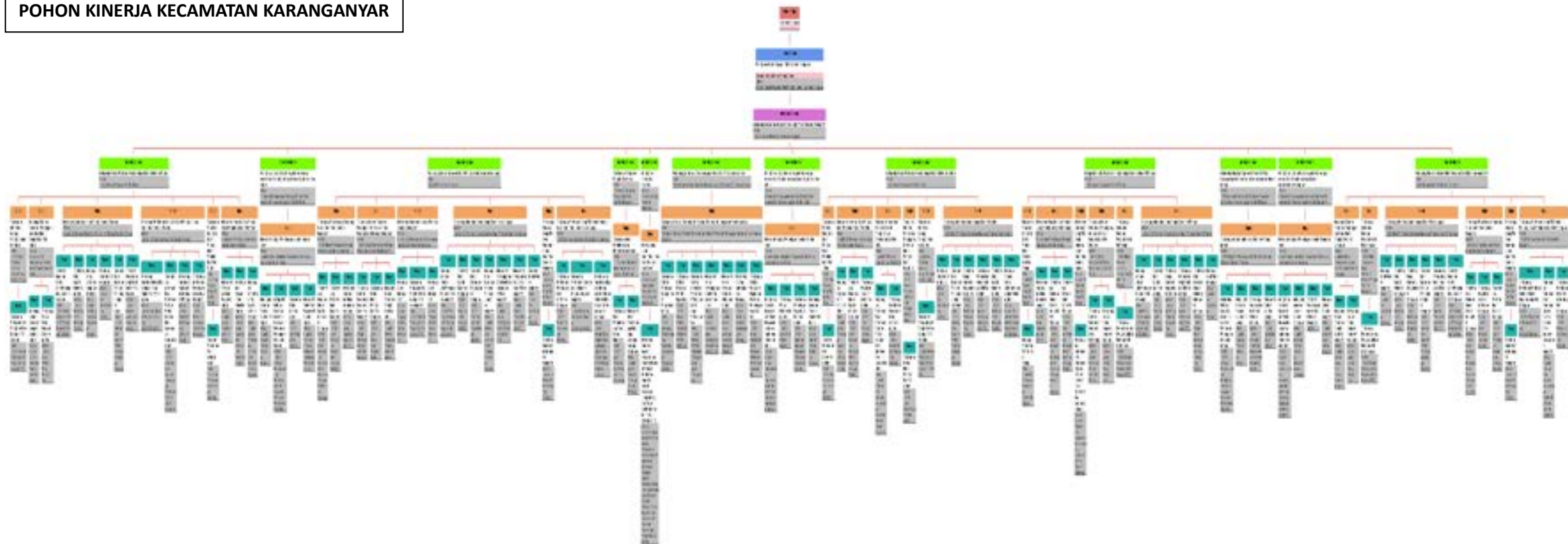
PUSI LESTARI, S.Sos., M.PA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197412261999032002

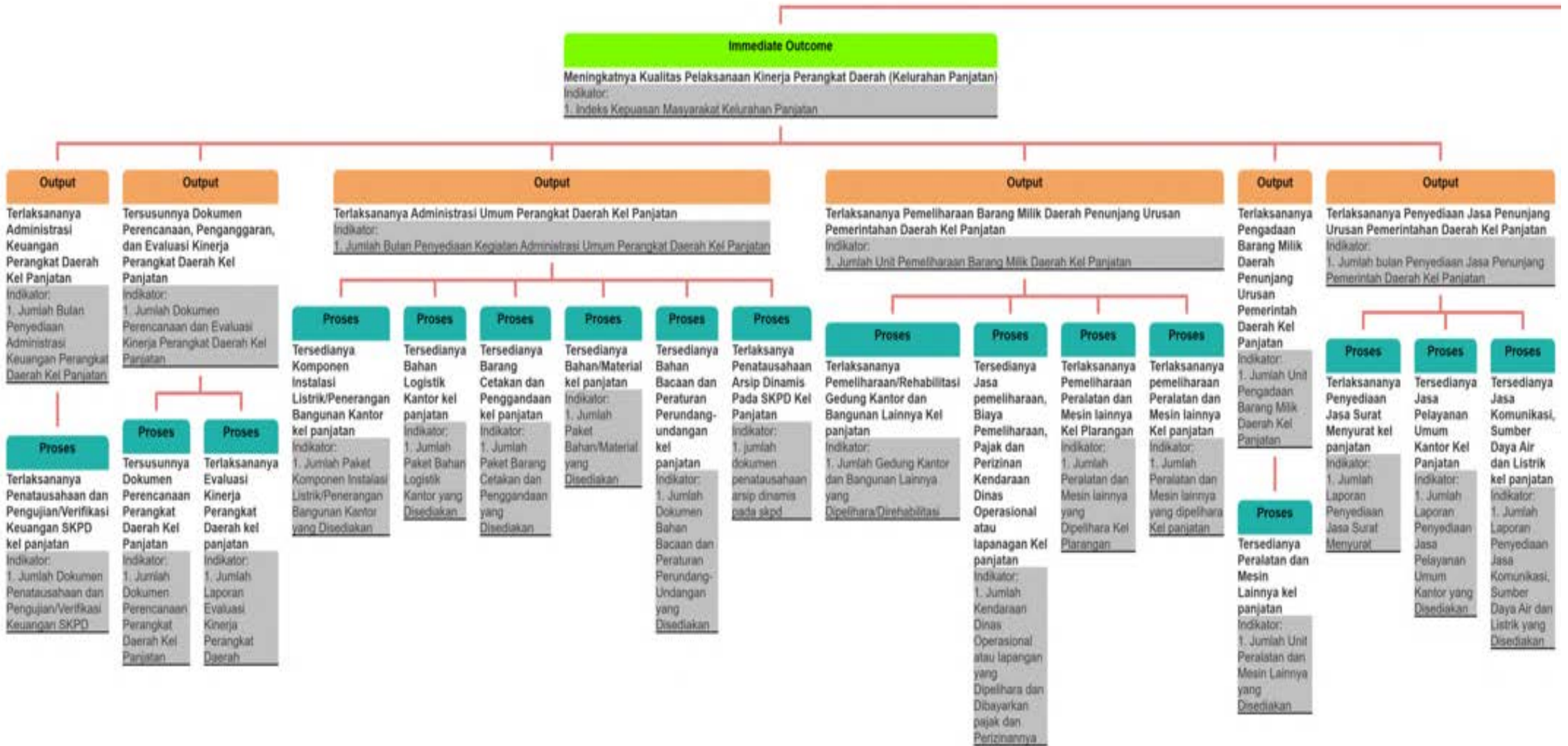
TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Cahyo N	mp
Cahyo R	

LAMPIRAN

POHON KINERJA

POHON KINERJA KECAMATAN KARANGANYAR





Immediate Outcome

Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan panjatan

Indikator:
1. Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Panjatan

Output

Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Panjatan (persen)

Indikator:
1. Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Dilaksanakan Kelurahan Panjatan

Proses

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel panjatan

Indikator:
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

Proses

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panjatan

Indikator:
1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Proses

Terlaksananya Evaluasi Kelurahan panjatan

Indikator:
1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan

Proses

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan panjatan

Indikator:
1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Output

Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec Karanganyar

Indikator:
1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah Kec Karanganyar

Proses

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kec karanganyar

Indikator:
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Proses

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec Karanganyar

Indikator:
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Proses

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat kec karanganyar

Indikator:
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output

Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Karanganyar

Indikator:
1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec Karanganyar

Proses

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec Karanganyar

Indikator:
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec Karanganyar

Proses

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kec karanganyar

Indikator:
1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Proses

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kel Jatiluhur

Indikator:
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kel Jatiluhur

Output

Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec Karanganyar

Indikator:
1. Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Karanganyar

Proses

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator:
1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Proses

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD kec karanganyar

Indikator:
1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Proses

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator:
1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Immediate Outcome

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Karanganyar)

Indikator:
1. Nilai SAKIP Kecamatan Karanganyar

Output

Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec Karanganyar

Indikator:
1. Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec Karanganyar

Proses

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kec karanganyar

Indikator:
1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Proses

Tersedianya Bahan Logistik Kantor kec karanganyar

Indikator:
1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Proses

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan kec karanganyar

Indikator:
1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Proses

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kec karanganyar

Indikator:
1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan

Proses

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kec karanganyar

Indikator:
1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Proses

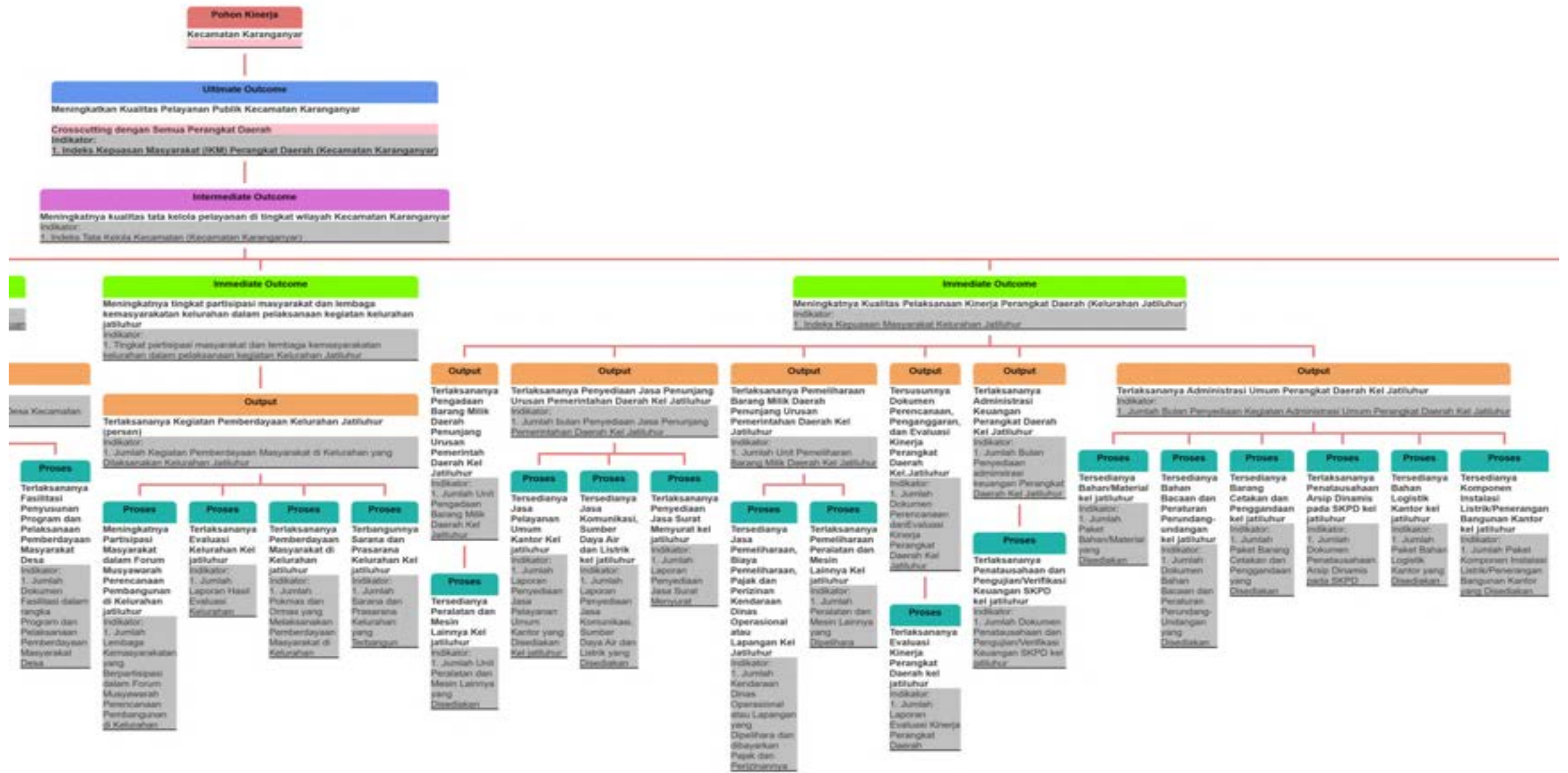
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD kec karanganyar

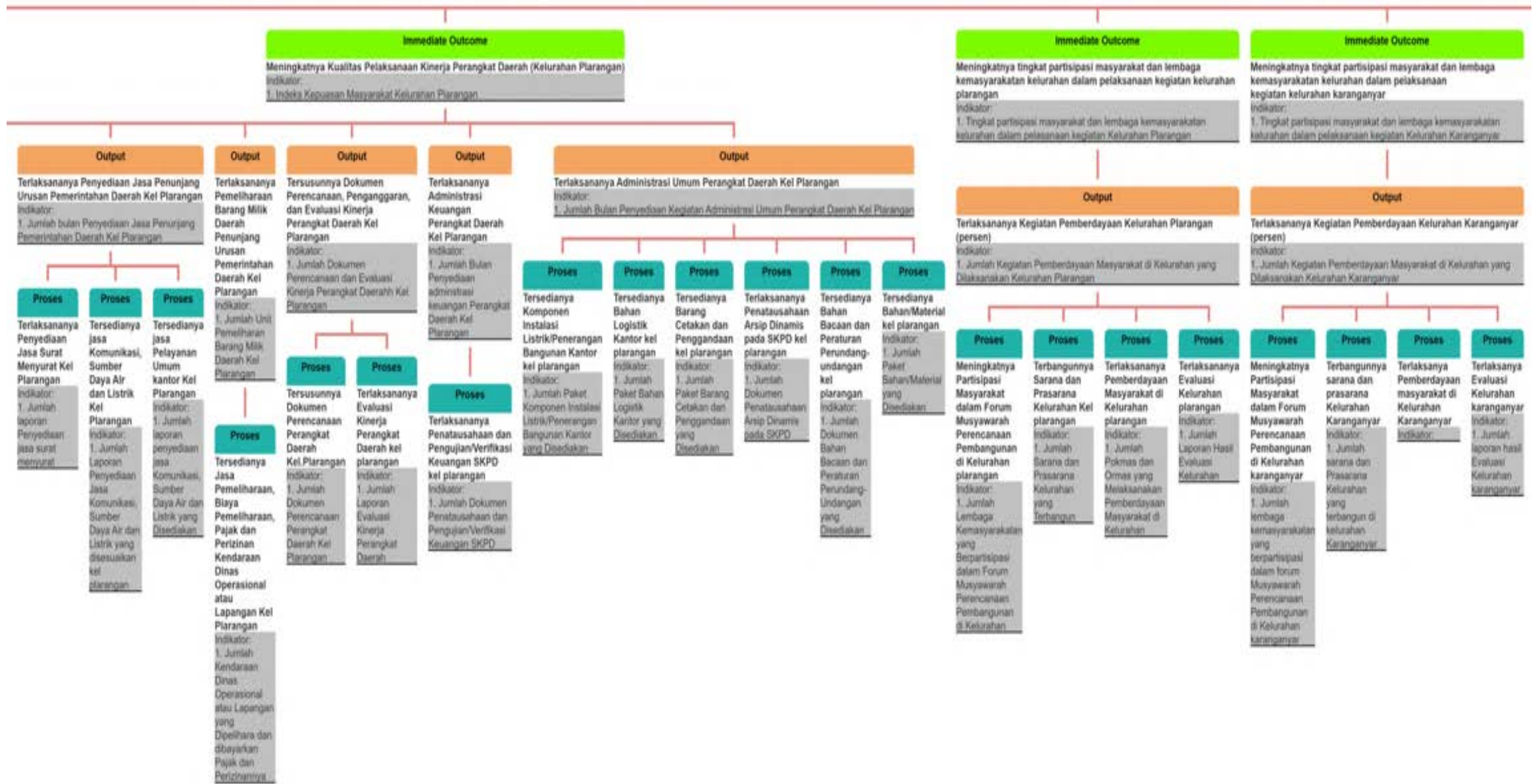
Indikator:
1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Proses

Tersedianya Bahan/Material kec karanganyar

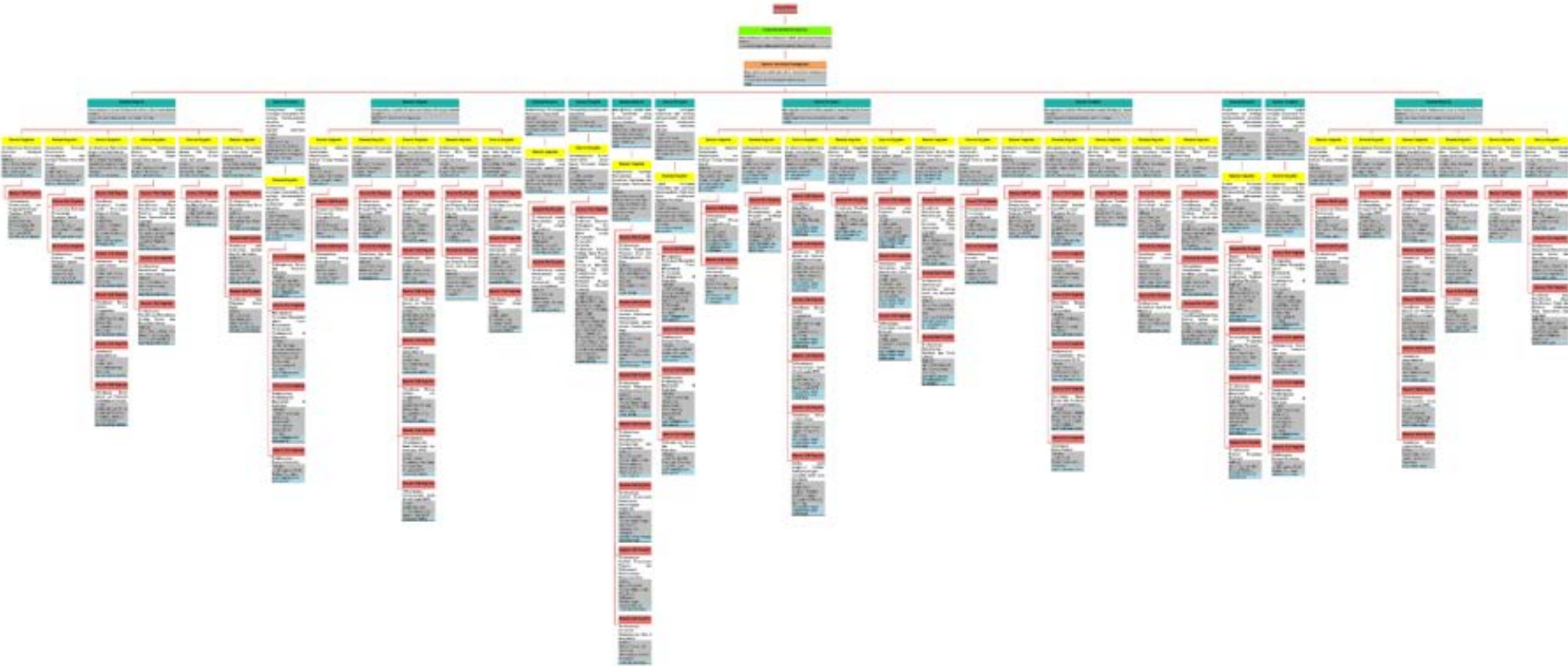
Indikator:
1. Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan



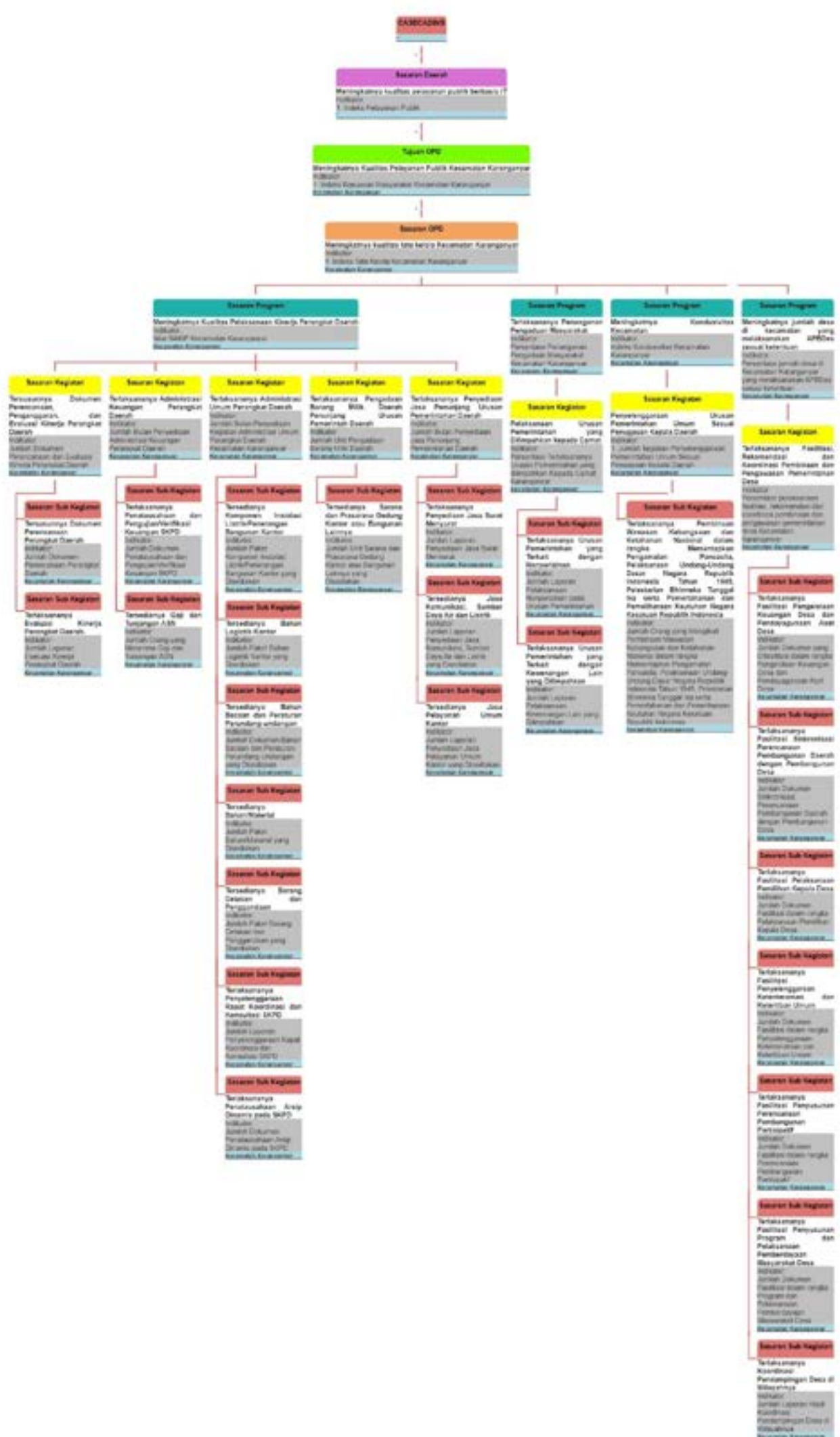


CASECADING

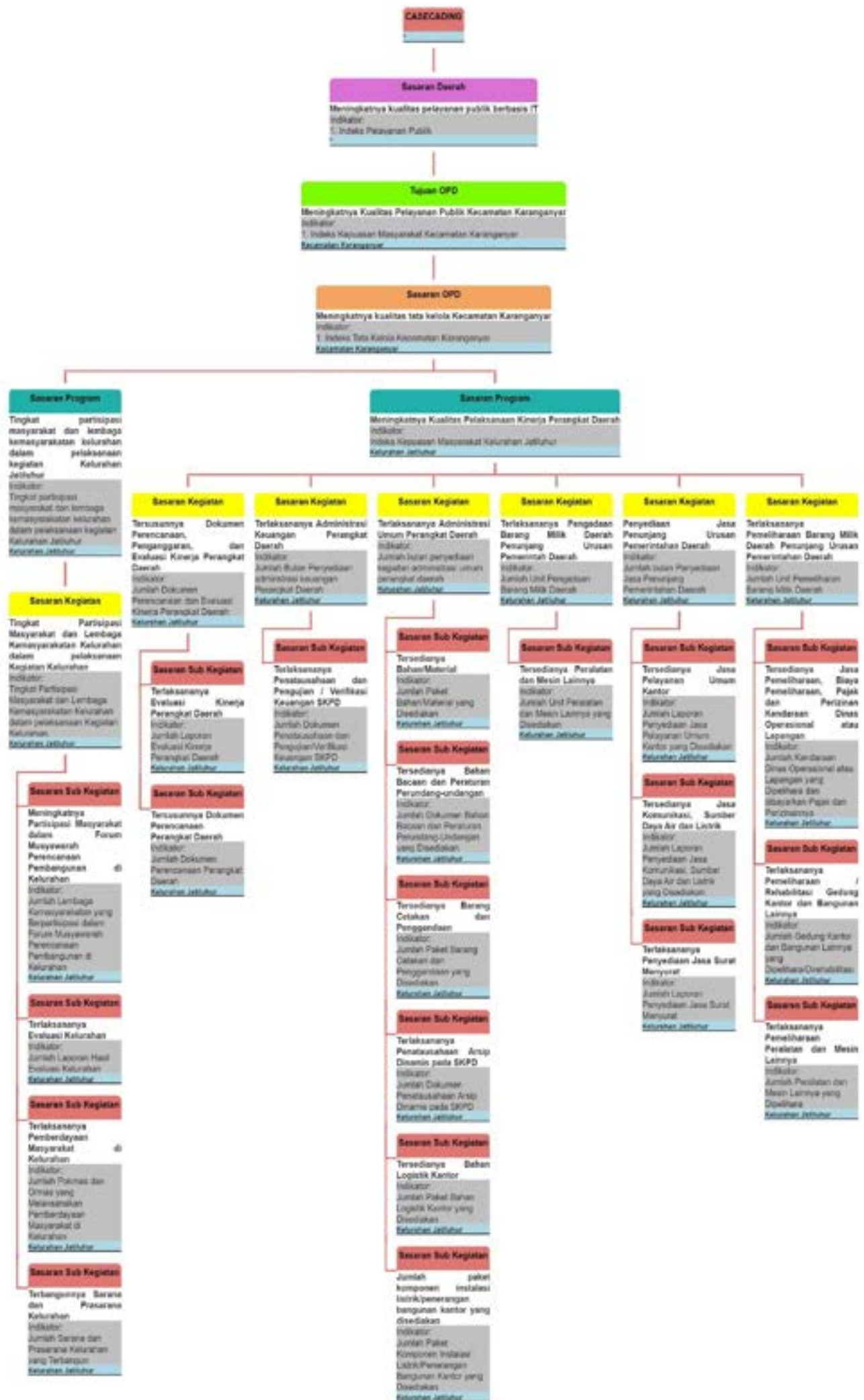
CASECADING



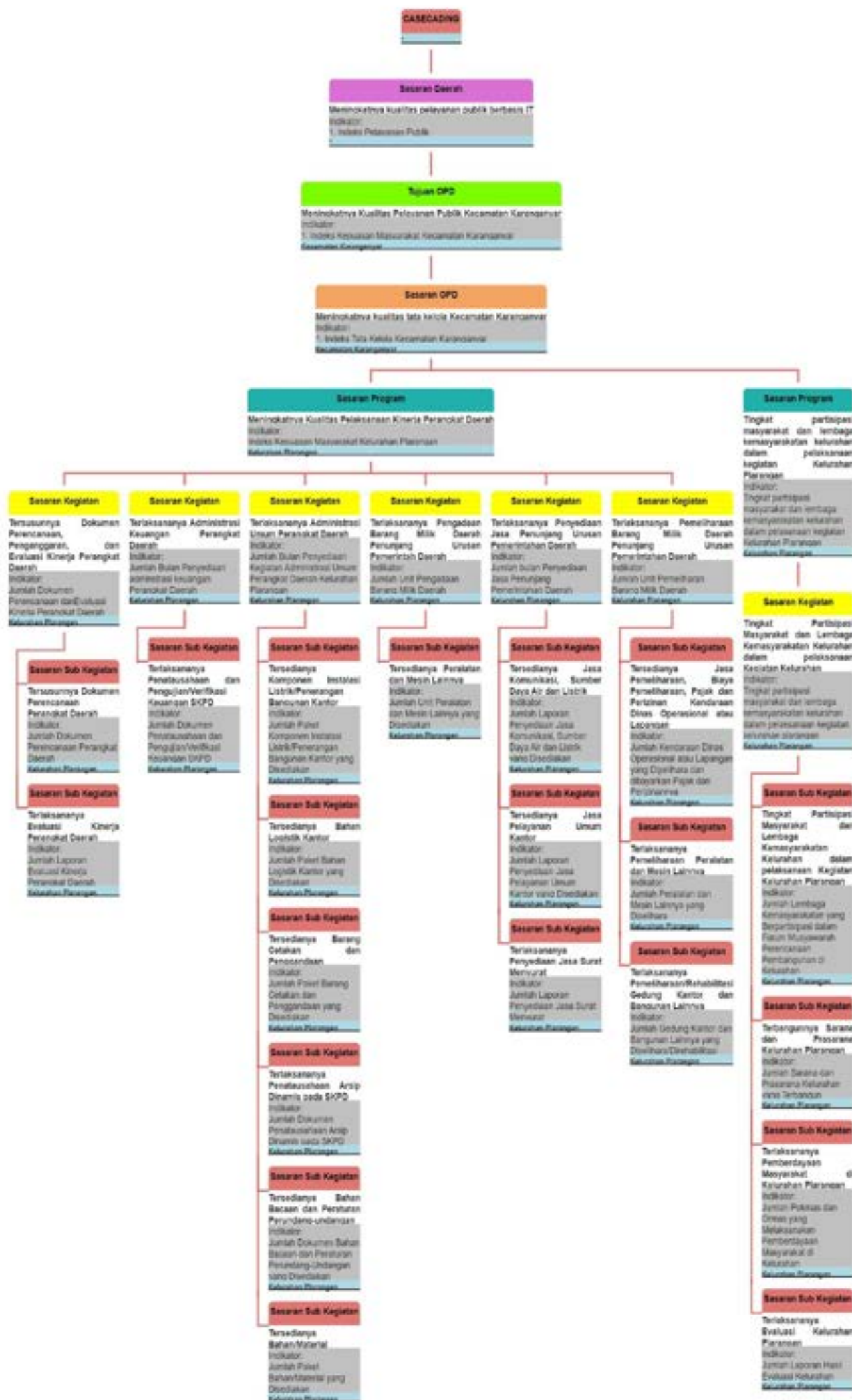
CASECADING KEC KARANGANYAR



CASECADING KEL JATILUHUR



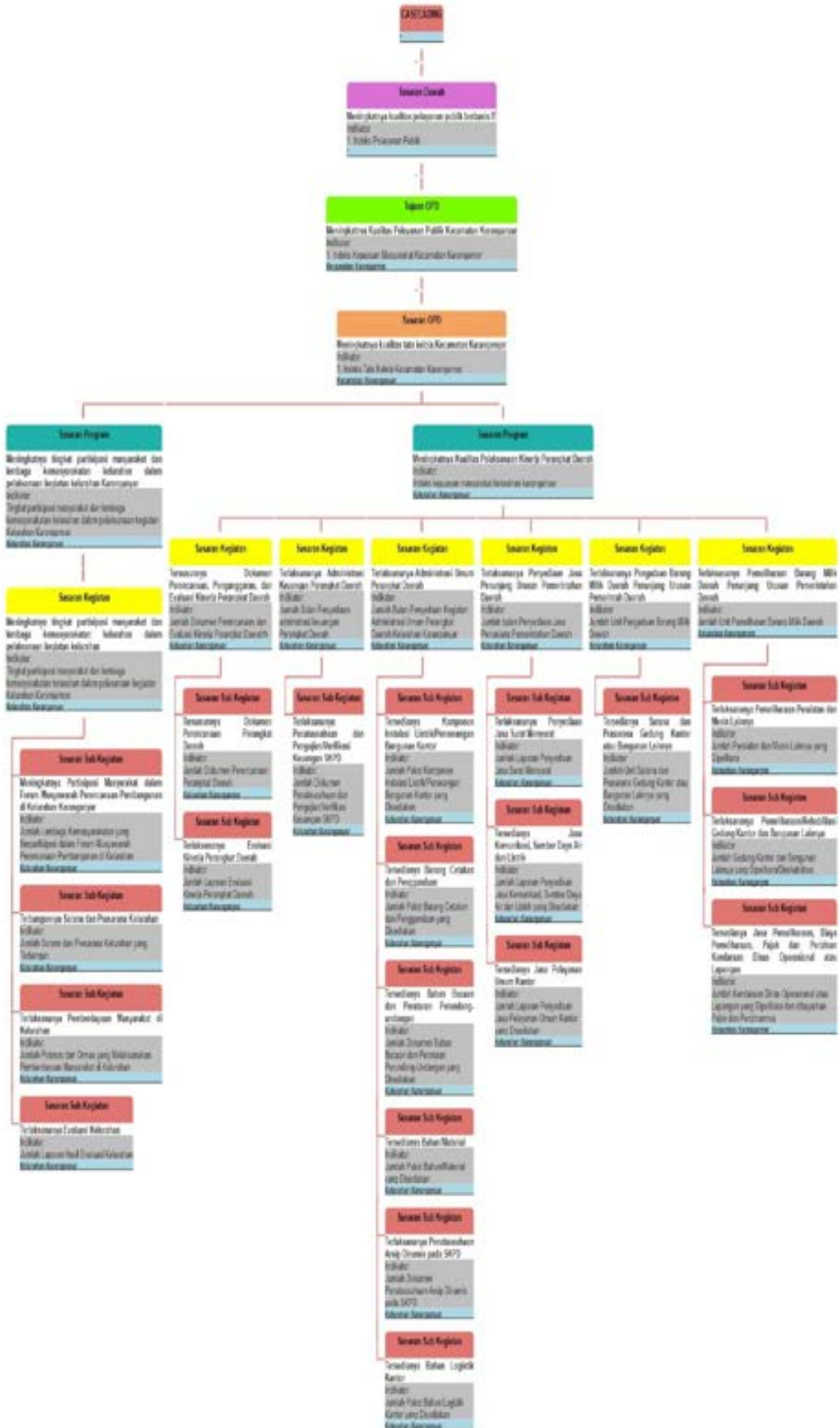
CASECADING KEL PLARANGAN



CASECADING KEL PANJATAN



CASECADING KEL KARANGANYAR



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN**

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Karanganyar

2026-03-29

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				9.102.450.416		9.131.070.658		9.371.979.015		9.687.170.710		9.894.866.885		
7.01	KECAMATAN				9.102.450.416		9.131.070.658		9.371.979.015		9.687.170.710		9.894.866.885		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.687.154.536		6.731.550.680		6.978.629.780		7.246.619.455		7.457.803.077	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:Nilai)	71,20	71,23	71,25		71,27		72,51		73,76		75,00		CAMAT
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Jatiluhur (Dengan Satuan:Nilai)	89	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		LURAH
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Plarangan (Dengan Satuan:Nilai)	92,24	92,30	92,33		92,35		92,36		92,38		92,40		LURAH
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjatan (Dengan Satuan:Nilai)	89	90,30	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		LURAH
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat kelurahan karanganyar (Dengan Satuan:Nilai)	88	90,3	90,4		90,45		90,5		90,55		90,6		LURAH
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					27.960.000		28.600.000		28.650.000		29.350.000		29.500.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	14		14		14		15		14		6. KASUBAG PK
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	9	9	9		9		9		9		9		KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	9	9	9		9		9		9		9		KASI PELUM DAN KESOS
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	9	9	9		9		9		9		9		KASI PELUM DAN KESOS

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahh (Dengan Satuan:Dokumen)	9	9	9		9		9		9		9		SEKRETARIS LURAH
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					16.500.000		16.750.000		16.750.000		17.100.000		17.200.000	K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	12		6		6		6		8		6		K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	7	5	6		6		6		8		6		6. KASUBAG PK
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					11.460.000		11.850.000		11.900.000		12.250.000		12.300.000	6. KASUBAG PK
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4		8		8		8		9		8		6. KASUBAG PK
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	6	8		8		8		9		8		6. KASUBAG PK
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.944.504.274		6.124.864.291		6.355.753.917		6.600.949.969		6.776.887.401	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		6. KASUBAG PK
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		SEKRETARIS LURAH
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.894.187.694		6.073.346.179		6.302.538.012		6.547.389.356		6.722.648.637	6. KASUBAG PK
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	45	45	45		45		45		45		45		6. KASUBAG PK
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					50.316.580		51.518.112		53.215.905		53.560.613		54.238.764	6. KASUBAG PK

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	6	3		3		3		3		3		6. KASUBAG PK
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					171.434.000		174.834.000		178.834.000		181.634.000		186.350.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		5. KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Plarangan (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Panjatan (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		4		12		12		12		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Karanganyar (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		SEKRETARIS LURAH
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					17.250.000		17.450.000		17.950.000		19.550.000		20.200.000	5. KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	12	4		4		4		4		4		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					50.400.000		49.900.000		52.200.000		51.300.000		54.900.000	5. KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					25.438.000		25.650.000		25.800.000		26.400.000		26.800.000	5. KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	12	4		4		4		4		4		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					10.580.000		10.900.000		10.950.000		11.550.000		11.650.000	5. KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		5. KASUBAG UMPEG

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					58.028.000		59.934.000		60.734.000		61.034.000		60.900.000	5. KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4		4		4		4		4		4		5. KASUBAG UMPEG
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	12	4		4		4		4		4		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	5. KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	12	4		4		4		4		4		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					6.238.000		7.500.000		7.700.000		8.300.000		8.400.000	5. KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	12	1		1		1		1		1		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					164.199.052		106.400.000		108.400.000		117.000.000		143.000.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	4	3	4		4		4		4		4		1. KASI TRANTIB
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	1	1	3		2		1		2		1		KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	1	4	5		3		2		2		2		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		3		3		3		3		SEKRETARIS LURAH
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					80.407.052		41.400.000		40.400.000		42.000.000		53.000.000	KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	3		1		1		1		1		KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					83.792.000		65.000.000		68.000.000		75.000.000		90.000.000	5. KASUBAG UMPEG

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		3		3		3		3		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185.075.000		135.450.000		136.950.000		141.850.000		145.850.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		5. KASUBAG UMPEG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa Penunjang pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		SEKRETARIS LURAH
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					7.643.000		8.450.000		8.750.000		9.350.000		9.450.000	5. KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					82.200.000		82.900.000		83.600.000		84.300.000		88.000.000	5. KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					95.232.000		44.100.000		44.600.000		48.200.000		48.400.000	5. KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					193.982.210		161.402.389		170.041.863		175.835.486		176.215.676	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	23	23	23		23		23		23		23		5. KASUBAG UMPEG

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	7	7	7		7		7		7		7		KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	17	17	17		17		17		17		17		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	13	13	13		13		13		13		13		KASI PELUM DAN KESOS
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	6	6	6		6		6		6		6		SEKRETARIS LURAH
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					42.723.000		48.100.000		49.200.000		48.300.000		48.900.000	5. KASUBAG UMPEG
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	10	20	10		10		10		10		10		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					33.600.000		33.100.000		38.200.000		39.300.000		39.400.000	5. KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	10	15	10		10		10		10		10		5. KASUBAG UMPEG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					117.659.210		80.202.389		82.641.863		88.235.486		87.915.676	5. KASUBAG UMPEG
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	3	3		3		3		3		3		5. KASUBAG UMPEG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		13.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		13.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat Karanganyar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		4. KASI PELUM KESOS
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		13.000.000	4. KASI PELUM KESOS

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		4. KASI PELUM KESOS
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	4. KASI PELUM KESOS
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		0		0		0		0		4. KASI PELUM KESOS
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	0		0		0		0		0		4. KASI PELUM KESOS
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.306.095.880		2.283.319.978		2.284.149.235		2.322.551.255		2.317.063.808	
	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Jatiluhur	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Jatiluhur (Dengan Satuan:Persen)	89	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		LURAH
	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Plarangan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Plarangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		LURAH
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan panjatan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Panjatan (Dengan Satuan:Persen)	89	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		LURAH
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan Karanganyar	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Karanganyar (Dengan Satuan:Persen)	82	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		LURAH
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.306.095.880		2.283.319.978		2.284.149.235		2.322.551.255		2.317.063.808	
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan . (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan plarangan (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Karanganyar (Dengan Satuan:Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					38.501.000		41.000.000		41.200.000		41.400.000		41.600.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan : L e m b a g a Kemasyarakatan)	8	8	8		8		8		8		8		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.878.924.960		1.826.417.064		1.840.949.235		1.869.985.659		1.859.711.192	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					384.669.920		407.351.944		393.800.000		402.265.596		406.752.616	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	8	8	8		8		8		8		8		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					4.000.000		8.550.970		8.200.000		8.900.000		9.000.000	SEKRETARIS LURAH
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		SEKRETARIS LURAH
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan : P e r s e n)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		1. KASI TRANTIB

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	1. KASI TRANTIB
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	55	55	55		55		55		55		55		1. KASI TRANTIB
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					83.200.000		90.200.000		83.200.000		92.000.000		92.000.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase jumlah desa di Kecamatan Karanganyar yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					83.200.000		90.200.000		83.200.000		92.000.000		92.000.000	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		3. KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					13.000.000		13.000.000		13.000.000		15.000.000		15.000.000	3. KASI TAPEM
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		3. KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		7.000.000		0		0		0	3. KASI TAPEM
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		7		0		0		0		3. KASI TAPEM
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					2.200.000		2.200.000		2.200.000		4.000.000		4.000.000	K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	1. KASI TRANTIB
	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		1. KASI TRANTIB
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					15.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000	K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		K A S U B A G PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	4. KASI PELUM KESOS
	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		4. KASI PELUM KESOS
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	4. KASI PELUM KESOS
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		4. KASI PELUM KESOS
			TOTAL:	9.102.450.416			9.131.070.658		9.371.979.015		9.687.170.710		9.894.866.885		

IKU KECAMATAN KARANGANYAR



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR

Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Telp. 0287 – 551002 Kode Pos 54364
Laman : kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatanaranganyar@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR
NOMOR : 700.1.1.3/2333/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Karanganyar tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Karanganyar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Camat Karanganyar,



Puji Lestari, S.Sos., M.PA
Pembina Tk I (IV/b)
NIP.197412261999032002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR
NOMOR 700.1.1.3/2333 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGANYAR

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan pelayanan publik oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Karanganyar	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karanganyar merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat	oleh Kecamatan Karanganyar. Diperoleh melalui formulasi pengukuran dengan berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.
1.1.1			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Karanganyar	Formulasi Pengukuran; (Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi +Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes	Indeks Tata Kelola Kecamatan Karanganyar adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Klirong yang menggambarkan

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					+Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun)x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100%	efektivitas tata kelola melalui ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes desa, serta ketepatan waktu desa dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100% Sumber data ; Kecamatan Penanggung Jawab; Camat	
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Karanganyar	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	Nilai SAKIP Kecamatan Karanganyar adalah hasil penilaian terhadap tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Klirong yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab; Camat Karanganyar	pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman evaluasi SAKIP yang berlaku di Kabupaten Kebumen.
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karanganyar	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Sumber data ; Kecamatan Karanganyar	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karanganyar adalah ukuran kemampuan Kecamatan Karanganyar dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Penanggung Jawab; Camat Karanganyar	yang diterima melalui mekanisme pengaduan resmi dalam periode tertentu.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Karanganyar	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data ; Kecamatan Karanganyar Penanggung Jawab; Camat Karanganyar	Indeks Kondusivitas Kecamatan Karanganyar adalah ukuran tingkat keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah Kecamatan Karanganyar yang dinilai berdasarkan jumlah gangguan ketertiban yang berhasil ditangani dibandingkan dengan seluruh gangguan ketertiban yang terjadi.
1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan	Persentase Desa di Kecamatan Karanganyar yang Melaksanakan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai	Persentase Desa di Kecamatan Karanganyar yang Melaksanakan APBDes Sesuai

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
			Pemerintahan Desa	APBDes Sesuai Ketentuan	ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Karanganyar Penanggung Jawab; Camat Karanganyar	Ketentuan adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Karanganyar dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebumen, 15 September 2025
Camat Karanganyar,



Puji Lestari, S.Sos.,M.PA
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197412261999032002